

**ANALISIS PELEMBAGAAN LEMBAGA PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA (LPMD) DI KABUPATEN REMBANG**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Oleh :

SURANTO DWI SANTOSO

D4E 003052

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

2005

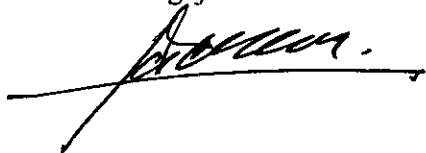
ANALISIS PELEMBAGAAN LEMBAGA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DI KABUPATEN REMBANG

Dipersiapkan dan disusun oleh
SURANTO DWI SANTOSO
D4E 003052

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal : 24 Maret 2005

Susunan Tim Penguji

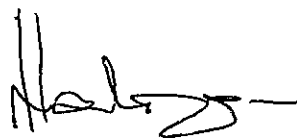
Ketua Penguji



Prof. Drs. Y. WARELLA, MPA, Ph.D

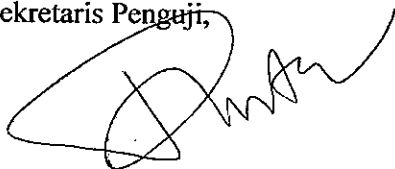
Anggota Tim Penguji Lain

1.



Prof. Drs. HARTOYO

Sekretaris Penguji,



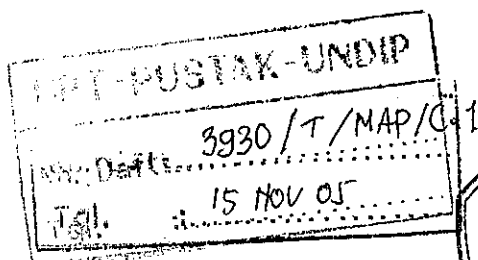
Dra. DEWI ROSTYANINGSIH, MSi.

2.



Drs. A. MAROM, M.Si.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Sain



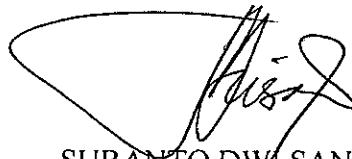
Tanggal : 24 Maret 2005
Ketua Program Studi MAP
Universitas Diponegoro
Semarang



Prof. Drs. Y. WARELLA, MPA, Ph.D

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

- Semarang, 17 Maret 2005



SURANTO DWI SANTOSO

ABSTRACT

The institutionalization analyzes of the Village Society Development

Institute (LPMD) in Rembang Regency

By Suranto dwi santoso

The research relationship among internal structure, resources and enabling linkages, which the aim is to find out of relation or the influence of each every variable or all variable with institutionalization level of LPMD in Rembang Regency. The sampling method is proportional random sampling method by whole of LPMD population in Rembang Regency, and it obtains 56 LPMD for sampling. The testing uses by thesis of rank kendall analysis, and to find out the amount of the relation the third free variable. Wit bonded variable use konkordation coefficient and the data processes uses SPSS programon the 95 % significant level. The outcome is :

- (1) There are the positive influence between internal structure variable with institutionalization grade of LPMD in Rembang Regency (z calculate 6,986 > z table 1,96)
- (2) There are the positive influence between resources variable with institutionalization grade of LPMD in Rembang Regency (z calculate 10,820 > z table 1,96)
- (3) There are the positive influence between enabling linkages variable with institutionalization grade of LPMD in Rembang Regency (z calculate 3,331 > z table of 1,96)
- (4) There are positive influence among internal structure , resources and enabling linkages with institutionalization grade of LPMD in Rembang Regency with $W = 0,876$ and Chi square value account 149,833 > tables 7,815), and determination coefficient value is 0,767. So it can be conclude the third variable influence 76,7 % to institutionalization level of LPMD in Rembang Regency

Key words : institutionalization, internal structure, resources, enabling linkages

ABSTRAKSI

Analisis Pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten Rembang

Oleh : Suranto dwi santoso

Penelitian tentang hubungan antara struktur intern, sumber daya dan kaitan yang memungkinkan bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh masing-masing variabel tersebut maupun secara bersama dengan tingkat pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten Rembang. Dalam pengambilan sampel dilakukan dengan metode proporsional random sampling dengan populasi seluruh LPMD di Kabupaten Rembang dan sampel yang diperoleh sebanyak 56 LPMD. Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis rank kendall, dan untuk mengetahui besarnya hubungan ketiga variabel bebas dengan variabel terikat dengan menggunakan koefisien konkordansi serta pengolahan data menggunakan program SPSS pada taraf signifikansi 95 %. Hasilnya adalah :

1. Terdapat pengaruh yang positif antara variabel struktur intern dengan tingkat pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten Rembang (z hitung $6,986 > z$ tabel $1,96$)
2. Terdapat pengaruh yang positif antara variabel sumber daya dengan tingkat pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten Rembang (z hitung $10,820 > z$ tabel $1,96$)
3. Terdapat pengaruh yang positif antara variabel kaitan yang memungkinkan dengan tingkat pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten Rembang (z hitung $3,331 > z$ tabel $1,96$)
4. Terdapat pengaruh yang positif antara variabel struktur intern, sumber daya dan kaitan yang memungkinkan dengan tingkat pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten Rembang dengan $W = 0,876$ dan nilai Chi square hitung $149,833 >$ tabel $7,815$), serta nilai koefisien determinasi sebesar $0,767$. Sehingga dapat disimpulkan ketiga variabel mempengaruhi sebesar $76,7 \%$ terhadap tingkat pelembagaan LPMD di Kabupaten Rembang

Kata kunci : pelembagaan, struktur intern, sumber daya, kaitan yang memungkinkan

RINGKASAN

Implementasi otonomi daerah meminta tanggungjawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kelembagaan dan aparatnya baik yang ada di kabupaten/kota maupun yang ada di desa/kelurahan. Supaya pembangunan lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan lembaga yang dapat berperan sebagai perencana, pelaksana pembangunan serta penggerak swadaya gotong royong. Di Kabupaten Rembang lembaga tersebut dinamakan sebagai Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002. Namun dalam perkembangannya lembaga tersebut kurang dapat berfungsi dengan baik atau proses pelembagaannya belum berjalan dengan baik. Menurut Milton J Esman pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan dan bimbingan bagi organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali yang (a) mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik dan atau sosial, (b) menetapkan, mengembangkan dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru, dan (c) memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut. Atau dengan kata lain pelembagaan berarti bahwa organisasi dan inovasi-inovasi yang dibawa oleh organisasi itu telah diterima dan didukung oleh lingkungan ekstern (masyarakat), peneliti menyimpulkan bahwa pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang tidak dapat berjalan dengan baik, artinya LPMD yang telah terbentuk belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. LPMD yang dibentuk belum merupakan keinginan seluruh warga masyarakat, namun sebagian hanya menyatakan untuk menjaga kesinambungan agar LKMD yang dulu tidak mati dan bahkan ada pula yang menyatakan hanya ingin membentuk sebagai syarat dicairkannya seluruh bantuan dana alokasi desa.

Penelitian ini mengambil sampel dilakukan dengan metode proporsional random sampling dengan populasi seluruh LPMD di Kabupaten Rembang dan sampel yang diperoleh sebanyak 56 LPMD. Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis rank kendall, dan untuk mengetahui besarnya hubungan ketiga variabel bebas dengan variabel terikat dengan menggunakan koefisien konkordansi serta pengolahan data menggunakan program SPSS pada taraf signifikansi 95 %. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif antara variabel struktur intern, sumber daya dan kaitan yang memungkinkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan tingkat pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten Rembang. Selain itu dalam penelitian terungkap bahwa tingkat pelembagaan LPMD di Kabupaten Rembang tergolong rendah. Jika hal ini tidak segera diperbaharui maka akan membawa implikasi terhadap proses pelembagaan LPMD, di mana :

- Tujuan pembentukan LPMD tidak akan terwujud dengan baik

- LPMD kurang dapat menjalankan tugas dan fungsinya, baik fungsi perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan fungsi yang lain.
- Pembangunan yang ada di desa menjadi tidak menentu karena kurangnya perencanaan dan pengkoordinasian dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu berkaitan dengan penelitian ini maka saran yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan sumber daya, maka karena pengaruhnya yang sangat kuat maka perlu peningkatan sumber daya baik sumberdaya manusia maupun sumber dana serta sumber daya yang lain. Peningkatan sumber daya dapat dilakukan dengan pelatihan peningkatan kemampuan misal Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) maupun pelatihan ketrampilan teknis lain. Di samping itu alokasi dana bantuan untuk LPMD perlu di tingkatkan dan perlu dicarikan alternatif pendanaan lainnya.
2. Karena pengaruh struktur intern terhadap pelembagaan cukup signifikan maka diperlukan penguatan struktur intern melalui berbagai pelatihan kapasitas lembaga (*capacity building*) kepada pengurus LPMD sehingga terdapat kompetensi teknis dalam semua komponennya dan kepaduan yang efektif di antara komponen-komponen dalam organisasi tersebut.
3. Kemudian dengan kaitan yang memungkinkan, hubungan kerjasama dengan berbagai pihak sudah cukup baik namun dengan pemerintah kabupaten dan BPD kurang baik. Untuk itu kepada pihak kabupaten harus rajin memberikan bantuan pembinaan dan pemberdayaan kepada LPMD melalui berbagai program penguatan kapasitas LPMD. Kepada BPD harus dilakukan sosialisasi secara intensif sehingga masing-masing mengerti akan tugas dan fungsinya masing-masing

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "*Analisis Pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten Rembang*". Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Dearajat Sarjana S-2 Ilmu Administrasi dengan konsentrasi Administrasi Publik pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan maupun saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D dan Dra. Dewi Rostyaningsih sebagai pembimbing dan penguji yang dengan segala kesabaran dan penuh pengertian telah memberikan bimbingan dan arahan yang jelas dan memberikan cakrawala yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini.
2. Prof. Drs. Hartoyo dan Dra. A. Marom, M.Si, sebagai penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.
3. Kepala Pusbindiklatren dan Pimpro PKSDMP Bappenas yang telah memberikan bantuan beasiswa untuk penulis.
4. Bupati Rembang, yang telah memberikan kesempatan untuk tugas belajar kepada penulis.

6. Kepala BKB & PM Kabupaten Rembang beserta staf yang telah banyak membantu penulis.
7. Seluruh pengurus LPMD di Kabupaten Rembang yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu, Istri dan anakku serta seluruh saudara yang telah memberikan dukungan moral dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini
9. Rekan-rekan mahasiswa MAP angkatan X yang telah banyak membantu penulis dengan segala bantuannya.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Meskipun segenap daya dan kemampuan sudah tercurahkan dalam penulisan tesis ini, namun penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Maret 2005

penulis

Suranto Dwi Santoso

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ IQRO “

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu yang terus berdo'a untuk anaknya
2. Istriku tercinta dengan segala pengorbanannya
3. Anakku Nabila, semoga kamu tekas sembuh Nak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.	11
C. Tujuan Penelitian.	12
D. Kegunaan Penelitian.	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Desa	14
B. Pelembagaan	19
C. Struktur intern	32
D. Sumber-sumber Daya	35
E. Kaitan yang memungkinkan.	37
F. Hubungan antar Variabel	39
G. Hipotesis	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian	43
B. Ruang Lingkup Penelitian.	44
C. Lokasi Penelitian	44
D. Variabel Penelitian	45
E. Jenis dan Sumber Data.	51
F. Instrumen Penelitian	51
G. Populasi dan Teknik Pengambilan sampel	52
H. Teknik Pengumpulan Data	54
I. Teknik Analisis Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian..	60
B. Hasil Penelitian	65
C. Analisis Hasil Penelitian.	101
D. Diskusi.	111

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.	117
B. Saran.	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah LPMD di Kabupaten Rembang	6
Tabel 2 Data Perkembangan LPMD di Kabupaten Rembang	8
Tabel 3 Daftar sampel penelitian.	53
Tabel 4 Jumlah seksi dalam LPMD	63
Tabel 5 Tingkat pendidikan pengurus LPMD.	64
Tabel 6 Kemampuan LPMD.	65
Tabel 7 Jumlah kegiatan yang direncanakan LPMD	66
Tabel 8 Jumlah program yang telah dan sedng dilaksanakan LPMD	67
Tabel 9 Kemandirian LPMD dalam perencanaan.	67
Tabel 10 Tingkat kemandirian LPMD dalam fungsi penggalian dan pemanfaatan sumber daya pembangunan	68
Tabel 11 Tingkat kemandirian LPMD dalam fungsi pelaksanaan pembangunan	69
Tabel 12 Tingkat kemampuan LPMD dalam menyerap aspirasi masyarakat	70
Tabel 13 Tingkat kemampuan LPMD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat	71
Tabel 14 Tingkat kemampuan LPMD dalam berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.	71
Tabel 15 Dukungan masyarakat terhadap LPMD	72
Tabel 16 Tingkat dukungan pemerintah daerah terhadap LPMD.	73
Tabel 17 Tingkat dukungan lembaga lain	74
Tabel 18 Tingkat pemberdayaan LPMD oleh Pemda	75
Tabel 19 Tingkat kejelasan pembagian kerja	76

Tabel 20 Tingkat kesesuaian pekerjaan dengan ketrampilan	76
Tabel 21 Beban pekerjaan yang harus diselesaikan	77
Tabel 22 Tingkat keberagaman pekerjaan yang dikelompokkan	78
Tabel 23 Tingkat kesamaan pekerjaan yang dikelompokkan.	78
Tabel 24 Tingkat kesesuaian jumlah anggota dengan tugas dan fungsi	79
Tabel 25 Pola hubungan antara pimpinan dengan anggota.	80
Tabel 26 Frekuensi rapat antara pimpinan dan anggota	81
Tabel 27 Tingkat wewenang yang diberikan pimpinan	82
Tabel 28 Tingkat partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan	82
Tabel 29 Tingkat dukungan pendidikan formal	83
Tabel 30 Tingkat dukungan pendidikan informal	84
Tabel 31 Tingkat kemampuan menyusun program	85
Tabel 32 Tingkat kemampuan merealisasikan program	85
Tabel 33 Jumlah dana yang dimiliki LPMD	86
Tabel 34 Tingkat kecukupan dana	87
Tabel 35 Tingkat kemudahan LPMD memperoleh informasi	87
Tabel 36 Tingkat akurasi informasi	88
Tabel 37 Kelengkapan kantor yang dimiliki	89
Tabel 38 Kualitas perlengkapan kantor	89
Tabel 39 Tingkat kewenangan yang diberikan oleh Pemda	90
Tabel 40 Tingkat keberhasilan usulan LPMD yang disetujui oleh pemda	91
Tabel 41 Tingkat kewenangan yang diberikan dalam melaksanakan	92

pembangunan di desa

Tabel 42 Tingkat hubungan LPMD dengan pemerintah desa	93
Tabel 43 Frekuensi rapat antara LPMD dengan Pemerintah Desa	94
Tabel 44 Dukungan pemerintah desa terhadap kegiatan LPMD	94
Tabel 45 Tingkat hubungan LPMD dengan BPD	95
Tabel 46 Tingkat dukungan BPD terhadap kegiatan LPMD	96
Tabel 47 Tingkat hubungan LPMD dengan PKK	96
Tabel 48 Tingkat dukungan PKK terhadap kegiatan LPMD	97
Tabel 49 Tingkat dukungan RT dan RW terhadap kegiatan LPMD	98
Tabel 50 Hubungan LPMD dengan lembaga lain	98
Tabel 51 Dukungan lembaga lain terhadap kegiatan LPMD	99
Tabel 52 Dukungan masyarakat (partisipasi) dalam proses	99
perencanaan pembangunan	
Tabel 53 Dukungan masyarakat (partisipasi) dalam proses	100
pelaksanaan kegiatan pembangunan	
Tabel 54 Variabel pelembagaan	101
Tabel 55 Variabel Struktur Intern	103
Tabel 56 Variabel Sumber Daya	103
Tabel 57 Variabel Kaitan yang memungkinkan	104
Tabel 58 Hubungan antara variabel struktur intern dengan pelembagaan	105
Tabel 59 Hubungan antara variabel sumber daya dengan pelembagaan	106
Tabel 60 Hubungan antara variabel kaitan yang memungkinkan	107
dengan pelembagaan	
Tabel 61 Uji rank kendall dan konkordansi kendall	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Universum Pembangunan Lembaga	20
Gambar 2 Model Organisasi Enam Kotak dari Weisbord	27
Gambar 3 Bangun Teori Pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten Rembang	30
Gambar 4 Struktur organisasi Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa	64

DAFTAR LAMPIRAN

Kisi-kisi kuesioner
Kuesioner penelitian
Tabel induk
Frekuensi jawaban responden
Total jawaban responden
Score variabel
Frekuensi variabel
Tabel silang (crosstabs) pelebagaan dengan struktur intern
Tabel silang (crosstabs) pelebagaan dengan sumber daya
Tabel silang (crosstabs) pelebagaan dengan kaitan yang memungkinkan
Uji hipotesis rank kendall dan konkordansi kendall
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 5 tahun 2002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi kewenangan dari pusat kepada daerah yang diwujudkan dalam bentuk otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab akan membawa daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, penggunaan dan pengembangan sumber daya yang ada di daerah masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan pembangunan yang selama ini didominasi oleh pusat akan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lain. Pemberian kewenangan ini memberikan konsekwensi kepada daerah untuk menggali potensi, terutama fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Desentralisasi sebenarnya merupakan suatu teknik untuk pemeratakan hasil pembangunan dengan menonjolkan partisipasi seluruh masyarakat.

Pembangunan yang telah berjalan selama masa orde baru lebih berorientasi pada paradigma pertumbuhan, namun dalam kenyataannya sulit untuk mendapatkan

trickle down effect. Kemudian pada masa transisi muncul paradigma kesejahteraan yang menjanjikan kesejahteraan rakyat dan keadilan serta memandang rakyat sebagai obyek alamiah melalui *charity strategy* dan sebagainya. Namun pendekatan ini meningkatkan ketergantungan rakyat terhadap pemerintah dan menjadi kendala dalam pembangunan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat yang diharapkan muncul ternyata hanya merupakan mobilisasi partisipasi untuk mendukung program pemerintah. Jadi, paradigma *bottom up* yang diinginkan belum dapat menjadi kenyataan.

Pembangunan yang berorientasi dengan menempatkan rakyat sebagai aktor utama, memiliki kekuatan dalam merencanakan, merumuskan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Hal ini merupakan model yang cocok untuk dilaksanakan seiring dengan makin kuatnya tuntutan daerah akan otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Kondisi ini akan membuat partisipasi rakyat muncul dengan sendirinya, karena masyarakat lebih tahu dan merasakan apa yang menjadi masalah dan kebutuhannya sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Bukan karena mobilisasi dari pemerintah melalui program-program pembangunan selama ini.

Dewasa ini, semakin disadari bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Untuk memudahhi keterlibatan masyarakat tersebut, perlu kiranya dibentuk suatu lembaga yang dapat :

- 1) memahami situasi dan kondisi kehidupan di desa/kelurahan secara cepat dan mudah

- 2) menemukenali, menganalisis dan menentukan permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat
- 3) menentukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dihadapi,
- 4) merumuskan rencana, program dan kegiatan yang lebih berkualitas sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta mampu melaksanakannya secara partisipatif dengan penuh tanggungjawab.

Implementasi otonomi daerah meminta tanggungjawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kelembagaan dan aparatnya baik yang ada di kabupaten/kota maupun yang ada di desa/kelurahan. Karena sebenarnya lembaga dan aparat yang ada di desa/kelurahan merupakan ujung tombak yang paling dekat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan.

Khusus di sini, penulis akan menyoroti lembaga perencana dan pelaksana pembangunan yang ada di desa. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa semua desa yang ada di Indonesia memiliki bentuk dan nama serta struktur organisasi yang sama. Namun seiring dengan semangat reformasi yang menekankan juga akuntabilitas pelaksanaan pembangunan Keppres tersebut direvisi dengan tidak lagi menempatkan Kepala Desa dan Ketua TP PKK Desa secara *ex officio* sebagai Ketua Umum dan Ketua II LKMD, namun boleh dijabat oleh orang lain. Dalam perkembangannya lembaga tersebut terus mengalami perubahan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. Kata sebutan lain

telah memberikan inspirasi kepada daerah untuk membentuk lembaga yang dimaksud sesuai dengan adat, budaya dan keinginan setempat.

Kabupaten Rembang sebagai salah satu wilayah kabupaten di Indonesia merespon Keputusan Presiden tersebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan diikuti dengan petunjuk pelaksanaannya sesuai dengan Keputusan Bupati Rembang Nomor 565 Tahun 2002 tanggal 29 - 11 - 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Jadi di Kabupaten Rembang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) telah diubah menjadi Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa Rukun Tetangga dan Rukun Warga, disebutkan desa/kelurahan dapat membentuk LPMD sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Masih dalam Perda tersebut disebutkan pengurus LPMD dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai peranan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Calon-calon pengurus LPMD sebagaimana dimaksud di atas diusulkan oleh RT dan dipilih oleh Badan Perwakilan Desa, Pemerintah Desa dan RT. Menurut Keputusan Bupati

Rembang Nomor 565 Tahun 2002 Pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan Perda nomor 5 Tahun 2002, maka bukan merupakan keharusan bagi desa/kelurahan untuk membentuk lembaga tersebut. Dalam perda tersebut tertulis bahwa desa/kelurahan dapat membentuk suatu lembaga yang dapat mewujudkan demokrasi di Desa/kelurahan yang berfungsi sebagai Lembaga Kemasyarakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam Pasal 3 Perda tersebut LPMD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
- b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat
- c. melaksanakan pembangunan

Dan dalam pasal 4 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya LPMD mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa atau kelurahan
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan
- c. pengkoordinasian perencanaan Lembaga Kemasyarakatan
- d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu
- e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk desa dan kelurahan

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LPMD membentuk suatu kepengurusan yang terdiri dari

- a. ketua
- b. wakil ketua
- c. sekretaris
- d. bendahara
- e. seksi-seksi, antara lain

- Kesejahteraan rakyat
- Keamanan
- Pendidikan dan kebudayaan
- Ekonomi dan pembangunan
- Pemuda dan olah raga
- Kesehatan

Berdasarkan data yang kami peroleh dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rembang di Kabupaten Rembang sejak ditetapkannya Keputusan Bupati Rembang Nomor 565 tanggal 29 – 11 – 2002 belum semua desa telah membentuk LPMD. Berikut data LPMD masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang.

Tabel 1 Data Jumlah LPMD di Kabupaten Rembang
sampai 31 Oktober 2004

NO	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah LPMD	Persentase
1.	Rembang	34	30	88.23 %
2.	Kaliori	23	21	91.34 %
3.	Sumber	18	18	100.00 %
4.	Sulang	21	18	85.71 %
5.	Bulu	16	15	93.75 %
6.	Pamotan	23	22	95.65 %
7.	Gunem	16	15	93.75 %
8.	Sale	15	15	100.00 %
9.	Lasem	20	18	90.00 %
10.	Pancur	23	23	100.00 %
11.	Sluke	14	13	92.86 %
12.	Kragan	27	25	92.59 %
13.	Sarang	23	23	100.00 %
14.	Sedan	21	21	100.00 %
	Jumlah	294	277	94.22 %

Sumber : Data Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat kab. Rembang, 2004.

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa belum semua desa telah membentuk LPMD. Kecamatan yang telah 100 % membentuk LPMD di desa/kelurahan 5 (lima) kecamatan, atau sekitar 36 %, atau jika dilihat dari jumlah desa yang telah membentuk LPMD sebesar 277 atau 94.22 %

Proses pelembagaan (institusionalisasi) dari LPMD berarti bahwa organisasi dan inovasi-inovasi yang dibawa oleh organisasi itu telah diterima dan didukung oleh lingkungan ekstern (masyarakat). Pembangunan lembaga (institution building) juga diartikan sebagai proses memperbaiki kemampuan lembaga guna mengefektifkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Jika melihat definisi tersebut maka pelembagaan LPMD di Kabupaten Rembang belum berjalan dengan baik, karena sebagian besar belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagian masih merupakan papan nama saja dan bahkan papan namapun ada yang tidak memilikinya. Hal ini jika dilihat dari berapa banyak program pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakannya, pengadministrasian kegiatan, pertemuan rutin yang jarang dilaksanakan, dukungan dari masyarakat dan sebagainya. Berikut merupakan data perkembangan LPMD di Kabupaten Rembang.

Tabel 2 Data Perkembangan LPMD di Kabupaten Rembang
Sampai 31 Oktober 2004

No	Kecamatan	Jumlah LPMD						Jumlah semua
		Berfungsi	%	Kurang berfungsi	%	Tidak berfungsi	%	
1.	Rembang	14	46.7	10	33.3	6	20.0	30
2.	Kaliori	9	42.8	9	42.8	3	14.4	21
3.	Sumber	5	27.8	7	38.9	6	33.3	18
4.	Sulang	9	50.0	8	44.4	1	5.5	18
5.	Bulu	7	46.7	5	33.3	3	20.0	15
6.	Pamotan	12	54.5	6	27.3	4	18.2	22
7.	Gunem	9	60.0	4	26.7	2	13.3	15
8.	Sale	6	40.0	4	26.7	5	33.3	15
9.	Lasem	11	61.1	6	33.3	1	5.5	18
10.	Pancur	13	56.5	8	34.8	2	8.9	23
11.	Sluke	8	61.5	2	15.4	3	23.1	13
12.	Kragan	12	48.0	8	32.0	5	20.0	25
13.	Sarang	9	39.1	7	30.4	7	30.4	23
14.	Sedan	10	47.6	9	42.9	2	9.5	21
	Jumlah	134	48.37	93	33.58	50	18.05	277

Sumber : Data Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat kab. Rembang, 2004, diolah.

Dari data tersebut nampak bahwa baru 134 LPMD atau 48,37 % LPMD telah berfungsi dalam artian telah memiliki program kerja dan realisasinya, administrasinya telah lengkap, kemudian 93 LPMD atau 33.38 % kurang berfungsi karena ada yang memiliki rencana kegiatan namun tidak ada realisasinya dan pengadministrasian kegiatan kurang lengkap. Sedangkan 50 LPMD yang lain belum dapat berfungsi

Mencermati perjalanan pembentukan LPMD di Kabupaten Rembang, berdasarkan laporan pembinaan yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rembang ditemukan banyak hal yang bisa mengakibatkan proses pelembagaan LPMD menjadi terhambat.

Pertama jika kita lihat dari pembentukannya belum semua LPMD telah dibuatkan Peraturan Desa dan SK Kepala Desa tentang pembentukannya. Padahal menurut petunjuk pelaksanaannya LPMD harus ada peraturan desa dan ditetapkan oleh kepala desa. Kemudian jika dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LPMD sebagian besar belum memiliki kantor, LPMD yang ada masing bergabung dengan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti BPD, PKK dan sebagainya.

Kedua, jika dilihat dari sumber dana yang dimiliki sebageian besar hanya bersumber dari dana bantuan desa/kelurahan, banyak LPMD yang belum mampu menggali partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan.

Ketiga jika dilihat dari susunan kepengurusan nampak bahwa jumlah seksi yang ada di tiap-tiap desa sangat berbeda. Ada desa yang hanya memiliki dua seksi namun adapula yang mencapai 10 (sepuluh) seksi. Jumlah seksi yang berbeda-beda di tiap LPMD akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPMD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Struktur yang sangat kecil kemungkinan akan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas karena beban yang ada akan semakin berat, namun jika terlalu besar juga akan mengakibatkan struktur yang gemuk sehingga menyulitkan organisasi bergerak dan melakukan inovasi.

Keempat, proses pelebagaan suatu organisasi tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat di samping organisasi itu sendiri. Keseriusan pemerintah terutama pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi pengurus LPMD, dalam tahun anggaran 2004 pemerintah kabupaten lewat Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat hanya sekali melakukan pembinaan dan itupun hanya untuk 56 desa dari 294 desa. Pembuatan aturan yang memungkinkan proses pemberdayaan lembaga sehingga dapat menjadi lembaga yang diterima oleh masyarakat dan penyediaan sumber daya terutama dana bagi LPMD sangat diperlukan. Kondisi saat ini dana untuk LPMD yang bersumber dari dana alokasi desa hanya Rp 900.000,- sampai dengan Rp 1.200.000,- untuk satu tahun per desa.

Proses pelembagaan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi itu sendiri dalam mengelola organisasi. Para pengurus diharapkan mengerti dengan benar tugas pokok dan fungsinya sehingga akan mampu mencapai tujuan organisasi.

Kelima, adanya lembaga BPD yang ada di desa turut memicu terhambatnya proses pelembagaan. Pertama karena sumber daya manusia yang lebih baik telah menjadi pengurus BPD; kedua, anggapan masyarakat bahwa BPD merupakan perwakilan aspirasi politik di desa sehingga mereka akan lebih menyampaikan aspirasinya kepada BPD dari pada LPMD walaupun untuk masalah pembangunan yang menjadi tugas LPMD. Di samping itu lembaga-lembaga yang ada di desa seperti pemerintah desa, PKK, RT, RW, Karang Taruna juga tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memiliki berbagai sumber daya kurang begitu dilibatkan dalam kegiatan LPMD.

Fakta-fakta empiris yang ada di LPMD tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja LPMD sangatlah rendah sehingga akibatnya proses pelembagaan LPMD menjadi suatu organisasi yang betul-betul melembaga akan sulit tercapai.

Kecenderungan yang demikian jika kita biarkan maka lambat laun LPMD sebagai lembaga perencana dan pelaksana pembangunan yang ada di desa akan ditinggalkan oleh masyarakat dan akan mati. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan berusaha mengungkap pengaruh struktur intern LPMD, sumber daya LPMD dan kaitan-kaitan yang memungkinkan terhadap tingkat pelembagaan LPMD.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa seringkali menemui berbagai hambatan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan walaupun lembaga tersebut telah terbentuk, namun lembaga tersebut belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa kurang berhasilnya pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa.

Permasalahan dalam proses pelembagaan LPMD di Kabupaten Rembang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Rendahnya tingkat pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten Rembang
- b. Rendahnya kinerja LPMD yang terbukti bahwa banyak LPMD yang tidak mempunyai rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan administrasi lembaga
- c. Kurangnya sumber daya baik dana maupun SDM bagi LPMD

- d. Para pengurus yang tidak mengetahui dengan baik tugas pokok dan fungsinya.
- e. Kurangnya dukungan dari pemerintah kabupaten dan kecamatan
- f. Kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga lain seperti pemerintah desa, BPD dan lainnya yang ada di desa
- g. Rendahnya dukungan masyarakat terhadap LPMD

Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh antara struktur intern terhadap tingkat pelebagaan LPMD ?
2. Apakah ada pengaruh antara sumber daya terhadap tingkat pelebagaan LPMD ?
3. Apakah ada pengaruh antara kaitan-kaitan yang memungkinkan terhadap tingkat pelebagaan LPMD ?
4. Apakah ada pengaruh antara struktur intern, sumber daya dan kaitan yang memungkinkan terhadap tingkat pelebagaan LPMD ?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur intern terhadap tingkat pelebagaan LPMD

2. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya terhadap tingkat pelebagaan LPMD
3. Untuk mengetahui pengaruh kaitan-kaitan yang memungkinkan terhadap tingkat pelebagaan LPMD
4. Untuk mengetahui pengaruh struktur intern, sumber daya dan kaitan yang memungkinkan terhadap tingkat pelebagaan LPMD

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Memberi masukan kepada aparat pembuat kebijakan terutama pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
2. Memberi sumbangan pemahaman atau menguji validitas terhadap teori pelebagaan suatu organisasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Desa

Sejarah pembangunan pedesaan di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak pemerintahan Soekarno. Namun kekacauan politik dan ekonomi telah menghalangi usaha-usaha pemerintah untuk memobilisasi massa bawah guna mendorong partisipasi masyarakat pedesaan dan dalam rangka memperbaiki kondisi hidup masyarakat desa dan juga meruntuhkan struktur mendasar dari masyarakat pedesaan. Institusi publik saat itu keberadaannya telah dilemahkan oleh perpecahan politik dan ideologi yang melekat dalam masyarakat desa, sementara kemampuan pemerintah untuk menjalankan kegiatan pembangunan di wilayah perdesaan semakin menurun.

Pada masa orde baru yang ditandai dengan pemerintahan birokrasi (*bureucratic polity*), mobilisasi massa yang melibatkan sejumlah besar rakyat hanya ditujukan untuk implementasi suatu kebijakan bukan dalam perumusan suatu kebijakan. Menurut Shelton Wanashinge dalam Budi Winarno (2003 : 101), birokrasi memainkan peran yang sangat besar dalam pelaksanaan program pembangunan masyarakat desa. Yang termasuk peran tersebut adalah mengarahkan pelaksanaan program pembangunan secara spesifik, mengorganisasikan dan mempromosikan pembangunan pedesaan, pengawasan, melakukan audit, melakukan monitoring terhadap organisasi-organisasi pedesaan.

Kini, setelah lebih dari tiga dekade pembangunan dilakukan, dampak pembangunan pedesaan yang telah salah arah sejak awalnya telah membawa Indonesia ke dalam tipe masyarakat yang belum mampu beranjak dari kategori berkembang. Pembangunan yang seharusnya dapat mengangkat kehidupan rakyat miskin, karena kebijakan pembangunan yang diambil lebih menguntungkan masyarakat kaya dan elit-elit pedesaan dan justru menghasilkan kemiskinan, kesenjangan pendapatan, pengangguran, mematikan inisiatif masyarakat miskin dan makin bergantungnya masyarakat terhadap birokrasi.

Seiring dengan semangat otonomi daerah, tuntutan masyarakat akan peran yang lebih besar dalam merencanakan, merumuskan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan makin kuatnya tuntutan daerah akan otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Kondisi ini akan membuat partisipasi rakyat muncul dengan sendirinya, karena masyarakat lebih tahu dan merasakan apa yang menjadi masalah dan kebutuhannya sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Bukan karena mobilisasi dari pemerintah melalui program-program pembangunan selama ini.

Menurut Inayatullah dan HS Wanashinge dalam Budi Winarno (2003: 21) strategi-strategi pembangunan desa di negara dunia ketiga menganut tiga model pembangunan. Pertama, adalah model intervensi rendah atau model produktivitas, dalam model ini upaya pemerintah ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanpa memandang perlu melakukan perubahan-perubahan penting dan substansial terhadap struktur sosial dan kepemilikan tanah. Strateginya adalah dengan

membantu penduduk desa yang memiliki modal, sumber-sumber, ketrampilan dan motivasi tinggi untuk meningkatkan produktivitasnya. Sehingga model ini hanya melayani lapisan menengah dan atas desa dan dampaknya semakin memperlebar kesenjangan antara penduduk miskin dan elit-elit desa tersebut.

Kedua, model intervensi sedang atau solidaritas, dalam model ini penyebab keterbelakangan desa adalah kemerosotan dan degenerasi masyarakat desa serta langkanya lembaga-lembaga desa yang dapat meningkatkan peran aktif penduduk desa. Oleh karena itu strateginya adalah membentuk lembaga-lembaga pedesaan baru, memodernisasi elit desa dan mendifusikan ketrampilan-ketrampilan organisasi dan hubungan manusia. Lapisan masyarakat yang banyak memperoleh keuntungan dari model ini adalah kelas menengah desa karena kelas ini yang memperoleh bagian terbesar dari program pembangunan desa yang dilaksanakan pemerintah. Sebagai suatu strategi, model ini kurang efektif karena tidak berhasil dalam memberikan pelayanan secara sukarela dan mendorong semangat komunitas di kalangan masyarakat bawah.

Ketiga adalah model intervensi yang tinggi, atau model pemerataan (*equality*), dalam model ini penyebab utama keterbelakangan desa adalah tidak meratanya pendapatan, kekayaan dan kekuasaan di kalangan penduduk desa. Menurut model ini, pembangunan desa memerlukan perjuangan dua arah, pertama penguasaan aparat-aparat pemerintah pada tingkat nasional melalui organisasi-organisasi politik yang relevan oleh lapisan masyarakat bawah untuk memudahkan transformasi secara radikal, dan kedua, perjuangan yang diorganisasikan menentang kelompok-kelompok

petani kaya pada tingkat lokal dengan jalan petani yang berpenghasilan rendah mengambil alih struktur kekuasaan lokal dan mendistribusikan tanah dan sarana-sarana produksi lain.

Dari ketiga model tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa apapun model pembangunan yang dipilih dalam perjuangan pembangunan desa diperlukan suatu organisasi desa yang kuat dan didukung oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat kelas bawah dan pemerintah. Alasannya adalah pertama, organisasi desa dapat sebagai mawadahi peran serta masyarakat, kedua, organisasi desa dapat memperjuangkan kelompok-kelompok penduduk miskin untuk menentang dominasi elit desa, dan ketiga organisasi desa dapat mempromosikan pembangunan desa kepada lembaga-lembaga di atasnya yang dapat mengendalikan alokasi sumber daya dan menetapkan kebijakan. Organisasi-organisasi ini mempunyai peran yang krusial dalam pembangunan. Peran krusial ini dapat dilihat dari sumbangan mereka dalam mempromosikan pembangunan desa dengan jalan memberikan informasi yang lebih terinci mengenai kondisi desa maupun kemungkinan-kemungkinan dari apa yang dilakukan badan-badan pemerintah.

Lembaga-lembaga desa juga dapat menyesuaikan kebijakan-kebijakan dan prioritas-prioritas umum dengan kebutuhan-kebutuhan dan keadaan-keadaan tertentu. Dalam konteks ini organisasi-organisasi desa dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan penetapan tujuan pembangunan. Selain peran ini, lembaga-lembaga desa diperlukan untuk mengatur penggunaan sumber-sumber yang diberikan oleh pemerintah secara efektif dan untuk memobilisasi sumber-sumber desa dalam proses

pembangunan. Organisasi desa juga dapat berperan dalam menghubungkan penduduk desa dengan lembaga-lembaga nasional yang menguasai sumber-sumber dan menetapkan kebijakan.

Menurut Shelton Wanashinge dalam Budi Winarno (2003 : 109) organisasi desa dapat berperan sebagai :

- a) Identifier, dimana organisasi desa dapat mengidentifikasi tujuan dan strategi pembangunan pedesaan
- b) Agitator, dimana organisasi desa berperan untuk mencapai tujuan yang sudah diidentifikasi sebelumnya
- c) Penggerak sumber daya, dimana organisasi desa dalam memobilisasi tenaga sukarela lokal dan sumber daya eksternal
- d) Organisator, dimana organisasi desa secara langsung mengimplementasikan program dan kebijakan pembangunan desa.

Mengingat begitu pentingnya peran organisasi desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka tepatlah kiranya di desa dibentuk suatu lembaga yang bertugas dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Pengalaman di Taiwan menunjukkan bahwa organisasi desa yang didukung oleh pemerintah telah menunjukkan peran yang efektif dalam mendukung program pembangunan pedesaan yang disponsori oleh pemerintah (Budi Winarno, 2003 : 1). Organisasi desa tersebut didirikan untuk mempromosikan pembangunan pedesaan dan untuk mendorong partisipasi masyarakat miskin tidak mampu untuk secara memadai mengartikulasikan kepentingan penduduk miskin.

Dalam upaya tersebut maka di Kabupaten Rembang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, di setiap desa dapat membentuk suatu lembaga pembangunan masyarakat desa (LPMD) yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta menggerakkan swadaya gotong royong.

B. Pelebagaan

Sebelum kita membahas faktor-faktor yang menentukan pelebagaan suatu institusi, terlebih dahulu perlu kita mengetahui pengertian daripada pelebagaan. Milton J Esman dalam Joseph W Eaton (1986 : 24) menyatakan bahwa pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan dan bimbingan bagi organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali yang :

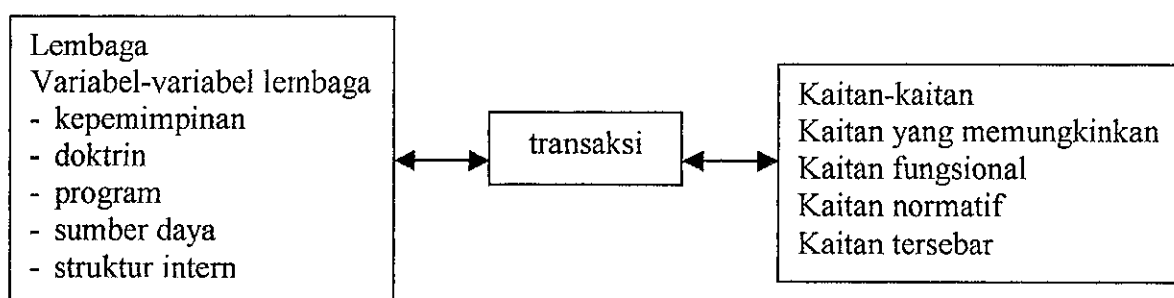
- a. mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik dan atau sosial,
- b. menetapkan, mengembangkan dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru, dan
- c. memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut.

Dengan kata lain pelebagaan (institusionalisasi) berarti bahwa organisasi dan inovasi-inovasi yang dibawa oleh organisasi itu telah diterima dan didukung oleh lingkungan ekstern (masyarakat) .

Pembangunan lembaga adalah suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan yang dibina. Ia menyangkut inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahan-perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola-pola perilaku dan

sebagainya. Pembangunan lembaga adalah suatu proses generik, dalam arti bahwa ia dapat diterapkan pada tiap bentuk inovasi sosial yang tidak dipaksakan. Dalam model pembangunan lembaga, lembaga diartikan sebagai organisasi formal yang menghasilkan perubahan dan yang melindungi perubahan dan jaringan dukungan-dukungan yang dikembangkannya dalam lingkungan.

Model pembangunan lembaga dari Milton J Esman dapat diringkas dalam diagram berikut :



Gambar 1 . Universum Pembangunan Lembaga (Joseph W Eaton, 1986 : 24)

Kerangka konseptual di atas memberikan suatu cara untuk mengidentifikasi metode-metode operasional dan strategi-strategi tindakan yang dapat membantu kita dalam menganalisis pembangunan suatu lembaga. Konsep-konsep pembangunan lembaga memberikan petunjuk-petunjuk bagi pelukisan sistematis tentang proses-proses interaksi sistem makro yang direncanakan untuk memudahkan pembangunan organisasi-organisasi pembaharu. Efektivitasnya akan diukur dengan menggunakan berbagai kriteria termasuk kemampuannya untuk menyediakan barang dan jasa bagi orang dengan kategori tertentu dan kemampuannya mempertahankan hidupnya dalam

suatu jaringan unit-unit yang saling mengisi dan sebagainya. Ada lima variabel lembaga yaitu :

- a. Kepemimpinan dalam lembaga adalah orang-orang yang secara aktif berkecimpung dalam perumusan doktrin dan program dari lembaga tersebut dan yang menggerakkan operasi-operasi dan hubungau-hubungannya dengan lingkungan tersebut. Kepemimpinan dipandang sebagai satu-satunya unsur yang paling kritis dalam pembangunan lembaga karena proses-proses perubahan yang dilakukan dengan sengaja itu memerlukan manajemen yang intensif, terampil dan yang telah mengikat dirinya secara mendalam baik dalam hubungan-hubungan intern maupun dengan lingkungan. Kepemimpinan terdiri dari para pemegang kedudukan kepemimpinan yang secara formal telah ditunjuk maupun mereka yang terus-menerus menjalankan pengaruhnya yang penting terhadap kegiatan - kegiatan lembaga (1986:24)
- b. Doktrin dirumuskan sebagai spesifikasi dari nilai-nilai., tujuan-tujuan dan metode-metode operasional yang mendasari tindakan sosial. Doktrin dipandang sebagai sederetan tema yang memproyeksikan baik di dalam organisasi itu sendiri maupun dalam lingkungan eksterennya, seperangkat citra dan harapan-harapan mengenai tujuan-tujuan lembaga dan gaya-gaya tindakan
- c. Program adalah suatu tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan dari fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan keluaran dari lembaga tersebut. Dengan demikian, maka program adalah terjemahan dari doktrin ke dalam pola-pola tindakan nyata dan alokasi dari energi-energi dari

sumber-sumber daya lainnya di dalam lembaga-lembaga itu sendiri dan yang berhubungan dengan lingkungan eksteralnya.

- d. Sumber-sumber daya, adalah masukan-masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi, dan penerangan dari lembaga tersebut. Jelasnya bahwa persoalan-persoalan yang tercakup dalam pengerahan dan dalam menjamin tersedianya sumber-sumber daya tersebut secara mantap dan yang dapat diandalkan mempengaruhi tiap segi dari kegiatan-kegiatan lembaga dan merupakan kesibukan yang penting dari semua kepemimpinan lembaga.
- e. Struktur intern, dapat dirumuskan sebagai struktur dan proses-proses yang diadakan untuk bekerjanya lembaga tersebut dan bagi pemeliharannya. Pembagian dari peranan-peranan di dalam organisasi tersebut, pola-pola wewenang internnya dan sistem-sistem komunikasinya, komitmen dari orang-orangnya pada doktrin dan program dari organisasi tersebut akan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah diprogram.

Suatu lembaga untuk dapat beradaptasi dan mendapat dukungan dari lingkungan, maka lembaga tersebut harus menjalin hubungan dengan kaitan-kaitan yang ada dalam lingkungan. Kaitan-kaitan adalah kesaling ketergantungan yang ada diantara suatu lembaga dan bagian-bagian masyarakat relevan lainnya. Organisasi yang dilembagakan tidak berada dalam isolasi, lembaga itu harus menetapkan dan memelihara suatu jaringan dari kelengkapan-kelengkapan dalam lingkungannya untuk terus hidup dan berfungsi. Di pihak lain lingkungan tersebut tidak dipandang sebagai suatu massa yang umum, tetapi lebih sebagai seperangkat struktur tersendiri

dengan mana lembaga yang bersangkutan harus bergaul. Lembaga tersebut harus memelihara suatu jaringan hubungan pertukaran dengan sejumlah organisasi yang terbatas dan melibatkan diri dalam transaksi-transaksi dengan maksud untuk memperoleh dukungan, mengatasi perlawanan, pertukaran sumber-sumber daya, penataan lingkungan tersebut, dan memindahkan norma-norma dan nilai-nilai. Yang khususnya penting adalah strategi-strategi dan taktik-taktik dimana kepemimpinan lembaga berusaha untuk memanipulasi atau menyesuaikan diri dengan hubungan-hubungan kaitan tersebut.

Kaitan-kaitan yang berhubungan dengan lembaga adalah :

a. Kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*)

Kaitan lembaga dari organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok sosial yang mengendalikan alokasi wewenang dan sumber-sumber daya yang diperlukan oleh lembaga tersebut untuk berfungsi.

b. Kaitan-kaitan fungsional

Kaitan-kaitan lembaga dengan organisasi-organisasi yang menjalankan fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan pelengkap dalam arti produksi, yang menyediakan masukan-masukan dan menggunakan keluaran-keluaran dari lembaga tersebut.

c. Kaitan-kaitan normatif

Adalah kaitan lembaga dengan lembaga-lembaga lain yang mencakup norma-norma, dan nilai-nilai baik positif maupun negatif yang relevan bagi doktrin dan program dari lembaga tersebut.

d. Kaitan-kaitan tersebar

Adalah kaitan lembaga dengan unsur-unsur dalam masyarakat yang tidak dapat dengan jelas diidentifikasi oleh keanggotaan dalam organisasi formal.

Saul M Katz dalam Eaton (1986: 179) menyatakan bahwa model pembangunan lembaga terdapat sebelas golongan konsep. Satu, kelembagaan dinyatakan sebagai hasil akhir, yang lima adalah variabel-variabel lembaga : kepemimpinan, doktrin, program, sumber-sumber daya dan struktur internal, yang empat adalah kaitan-kaitan : yang memungkinkan, yang fungsional, yang normatif dan yang menyebar. Konsep transaksi didaftar secara terpisah dan dalam suatu gambar dilukiskan sebagai yang menghubungkan variabel lembaga dan kaitan-kaitannya.

Masih menurut Saul M Katz dalam Eaton (1986 : 174) organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem. Di mana organisasi sebagai kumpulan unsur-unsur yang memiliki pola-pola hubungan yang teratur dan berulang yang berpusat pada sasaran atau tujuan yang dikenali. Pandangan dari segi sistem menyarankan adanya tiga dimensi analisis yaitu tujuan-tujuan yang dikenali, subsistem fungsional dan kaitan antara organisasi dengan lingkungannya. Di dalam analisis tujuan kita membicarakan doktrin dan kelembagaan, di bawah dimensi subsistem fungsional kita masukkan struktur internal, di bawah kaitan-kaitan kita masukkan enam macam yaitu yang memungkinkan, yang fungsional, sumber daya, yang normatif, menyebar dan transaksi. Konsep kepemimpinan dan program dipisahkan .

Sedangkan menurut Norman T Uphoff dan Warren F Ilchman dalam (Eaton : 125), dalam mengembangkan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan (a) mencapai perubahan-perubahan dalam nilai-nilai dan struktur di dalam dan di luar dirinya melalui pengalokasian yang strategis dan taktis, (b) menetapkan, memelihara dan melindungi pola-pola hubungan dan tindakan normatif melalui kepemimpinan dan penggunaan doktrin serta diperkuat alokasi-alokasi strategis dan taktis dan (c) memperoleh dukungan dan arus sumber daya dari organisasi –organisasi dan sektor-sektor dalam lingkungannya. Dalam pembangunan lembaga menurut Uphoff dipengaruhi oleh variabel dalam lembaga dan lingkungan. Variabel dalam lembaga meliputi sumber-sumber daya, kepemimpinan, doktrin, program dan struktur internal. Sedangkan lingkungan tidak sebagai massa umum namun lebih sebagai struktur-struktur tersendiri dengan mana lembaga yang merupakan subyek itu harus berhubungan. Lembaga harus memelihara suatu jaringan hubungan tukar-menukar dengan sejumlah organisasi terbatas dan melakukan transaksi-transaksi dengan tujuan mendapatkan dukungan, mengatasi perlawanan, saling tukar sumber daya, menyusun keadaan lingkungan dan memindahkan norma-norma dan nilai-nilai. (Eaton, 1986 : 138)

Jika dipandang sebuah lembaga sebagai sebuah organisasi, maka ada beberapa pendapat dari para ahli lain yang menyatakan beberapa faktor penting yang sangat mempengaruhi keefisienan dan keefektifan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Weisbord (Miftah Toha, 1993 : 98), menyebutkan bahwa suatu model dalam organisasi digambarkan mempunyai 6 (enam) kotak, yaitu : tujuan, struktur, penghargaan, mekanisme tata kerja, tata

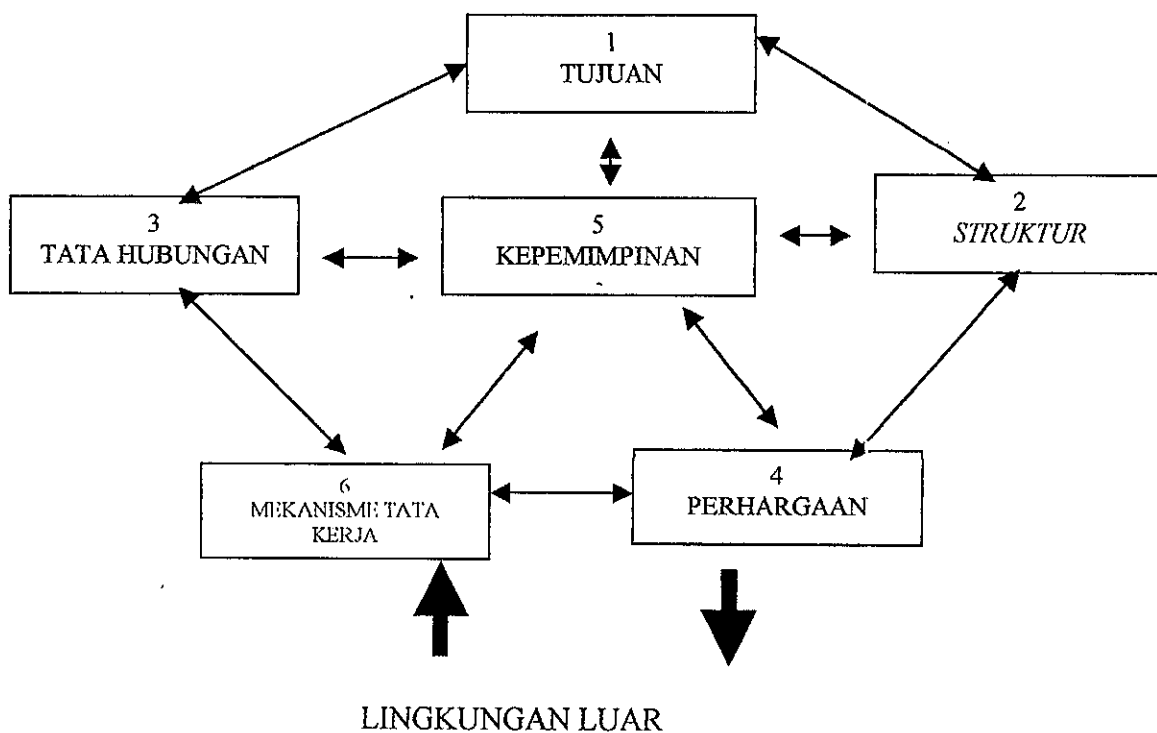
hubungan dan kepemimpinan. Setiap kotak harus didiagnosis baik yang meliputi sistem formal maupun informal. Suatu aspek penting dari setiap diagnosis organisasi adalah menemukan kesenjangan antara dimensi formal dalam suatu organisasi dengan profertis informalnya. Semakin besar jurang kesenjangan maka semakin besar pula tingkat inefisiensi organisasi.

Berikut akan dijelaskan masing-masing kotak dari Weisbord,

- a) Kotak tujuan, untuk mendiagnosis kotak tujuan, ada dua hal yang dianggap penting oleh Weisbord adalah (1) kejelasan tentang tujuan organisasi dalam hal ini sampai dimana para anggota organisasi memahami secara jelas dan benar akan visi dan tujuan organisasi, (2) persetujuan dengan tujuan tersebut, dalam hal ini dukungan dari para anggota untuk bertekad mencapai tujuan organisasi.
- b) Kotak struktur, untuk menemukan jawaban tentang apakah ada keselarasan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan kerangka struktur internal yang dibangun. Dengan kata lain apakah struktur internal yang telah dibangun benar-benar melayani tujuan organisasi.
- c) Kotak tata hubungan, meliputi tata hubungan antara individu dengan organisasi, tata hubungan antara unit-unit organisasi yang berbeda tugas kegiatannya dan tata hubungan antara orang-orang dengan sifat dan keharusan yang dituntut oleh pekerjaannya.
- d) Kotak penghargaan (*rewards*), dalam hal ini apakah sistem penghargaan tentang paket kompensasi, gaji, sistem insentif, dan bentuk penghargaan lainnya yang telah diberikan oleh organisasi dirasakan oleh karyawannya sebagai penghargaan atau hukuman.

- e) Kotak kepemimpinan, dalam diagnosis untuk kepemimpinan diarahkan kepada seberapa jauh seorang pemimpin itu (1) merumuskan tujuan organisasinya, (2) menjabarkan tujuan tersebut dalam program-program, (3) mempertahankan integritas organisasinya dan (4) memelihara peraturan dan apresiasinya terhadap konflik yang timbul
- f) Kotak mekanisme tata kerja, proses diagnosis pada kotak ini menekankan pada sampai dimanakah mekanisme tata kerja membantu para karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dan sampai dimana pula mekanisme tata kerja tersebut lebih bersifat menghalangi daripada membantu para karyawan.

Untuk lebih jelasnya model organisasi yang disampaikan oleh Weisbord dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 : Model Organisasi Enam Kotak dari Weisbord

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas, berkaitan dengan rencana penelitian yang memusatkan perhatian mengenai analisis pelebagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang, maka penulis berpendapat bahwa untuk meningkatkan tingkat pelebagaan lembaga tersebut agar dapat diterima dan didukung oleh lingkungan eksteralnya dipengaruhi faktor-faktor antara lain :

1. kepemimpinan
2. doktrin
3. program
4. sumber daya
5. *struktur intern*
6. *sumber-sumber daya*
7. tujuan
8. tata hubungan
9. penghargaan
10. metode kerja
11. *keterkaitan-keterkaitan baik dengan lingkungan, fungsional dan sebagainya*

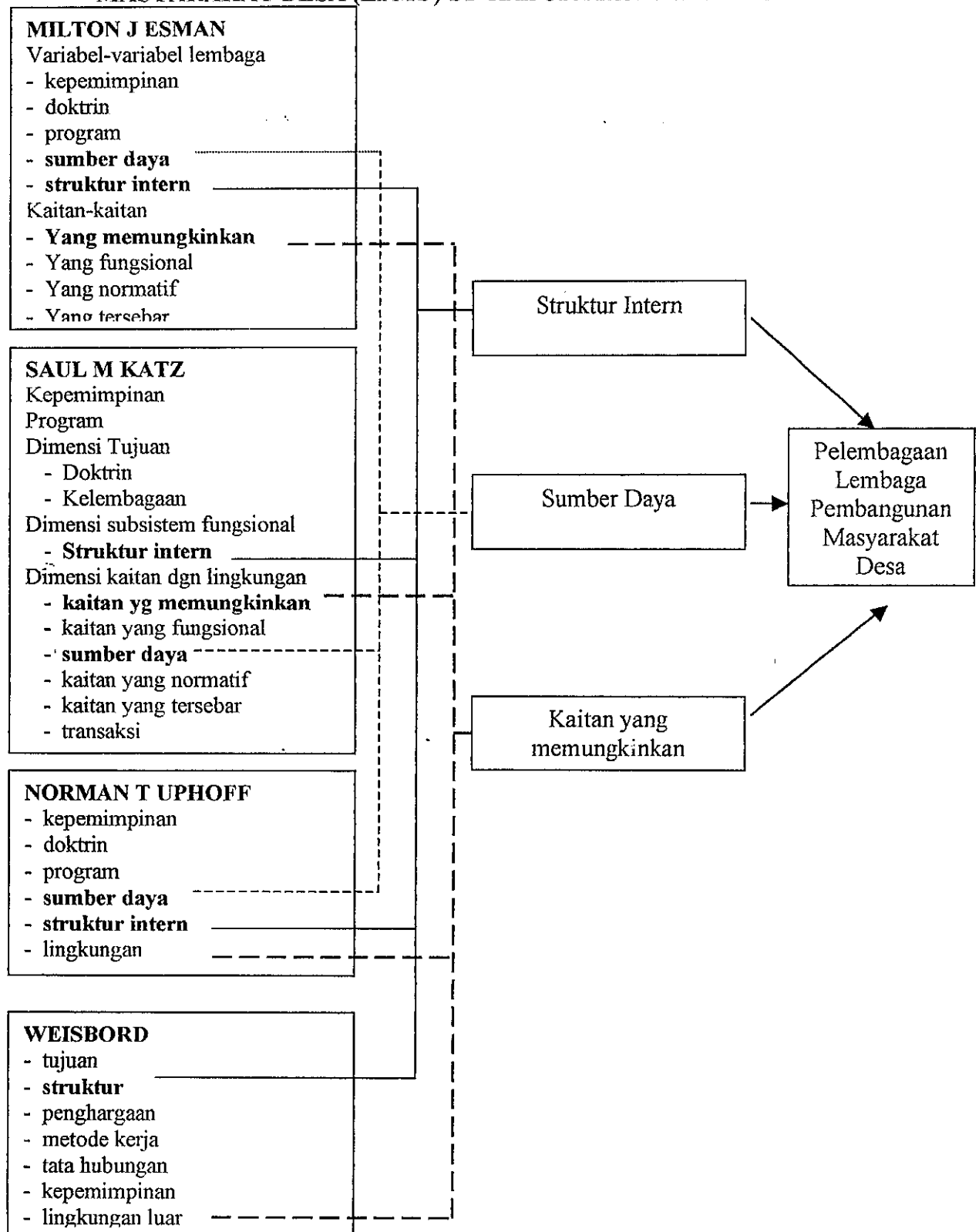
Mengingat sedemikian banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelebagaan suatu organisasi, maka penulis membatasinya pada 3 (tiga) faktor yang dianggap dominan mempengaruhi proses pelebagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang jika dikaitkan dengan penyebab kurang optimalnya LPMD dalam menjalankan fungsinya sehingga LPMD tersebut dapat

mencapai tujuan dari suatu proses pelebagaan yaitu, struktur intern, sumber daya dan kaitan yang memungkinkan. Pemilihan ketiga faktor tersebut erat kaitannya dengan latar belakang masalah yang ada di dalam penelitian ini.

Struktur intern yang ada dalam LPMD yang sangat berbeda antara LPMD satu dengan yang lain, akan berpengaruh terhadap kelancaran tugas yang akhirnya mempengaruhi tingkat pelebagaan. Hal ini berkaitan dengan pembagian tugas, departementalisasi, rentang kendali, sistem komunikasi dan delegasi wewenang. Sumber daya memiliki kaitan yang erat dengan tingkat pelebagaan karena sumberdaya merupakan berbagai macam masukan untuk diproses menjadi suatu produk yang akan diberikan kepada lingkungan eksterntnya. Manakala tidak ada input tentunya tidak akan ada proses dan output. Sumberdaya LPMD yang sangat terbatas tentunya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat pelebagaan. Kaitan yang memungkinkan merupakan kaitan lembaga tersebut dengan lembaga lain yang mengendalikan alokasi wewenang dan sumberdaya yang digunakan organisasi tersebut dapat berfungsi. Jika lembaga tersebut sudah berfungsi maka besar kemungkinan lembaga tersebut akan dapat didukung oleh lingkungan eksterntnya. Sebagai organisasi masyarakat yang mengandalkan sumber daya dan dukungan dari luar maka LPMD sangat tergantung pada kaitan yang memungkinkan yang dapat mengendalikan alokasi sumber daya dan dapat menerima serta mendukung LPMD.

Teori-teori pelebagaan tersebut diatas dapat kita buat sebuah bangun teori yang dapat menjelaskan proses pelebagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat desa di Kabupaten Rembang sebagai berikut.

Gambar 3 :
BANGUN TEORI PELEMBAGAAN LEMBAGA PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA (LPMD) DI KABUPATEN REMBANG



Suatu proses pelebagaan akan mencapai suatu kondisi akhir dari suatu proses yang dikenal dengan kelembagaan. Kelebagaan berarti bahwa organisasi dan inovasi-inovasi yang dibawanya telah diterima dan didukung oleh lingkungan eksternalnya. Lingkungan telah menyesuaikan dirinya dengan inovasi-inovasi tersebut lebih dari organisasi telah menyesuaikan diri terhadap lingkungan aslinya. Proses penyesuaian diri ini menyangkut hubungan-hubungan fungsional, normatif dan kekuasaan.

Keadaan akhir suatu proses pelebagaan yakni perubahan untuk memenuhi kriteria :

1. kemampuan teknis, kemampuan untuk memberikan jasa-jasa teknis dimana inovasi-inovasi bagi masyarakat pada tingkat kompetensi yang makin bertambah.
2. komitmen-komitmen normatif, sejauhmana gagasan-gagasan, hubungan-hubungan dan praktek-praktek inovatif yang diperjuangkan organisasi tersebut telah diresapi stafnya
3. dorongan inovatif, kemampuan dari lembaga untuk melanjutkan mengadakan inovasi-inovasi sehingga teknologi-teknologi dan pola-pola baru yang diperkenalkannya tidak akan membeku dalam bentuk aslinya, tetapi lembaga dapat belajar terus-menerus dan menyesuaikan diriterhadap kesempatan-kesempatan teknologi dan politik baru
4. citra lingkungan, sejauhmana lembaga dipandang berharga dan menguntungkan dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh kemampuannya untuk (a) memperoleh sumber daya tanpa pengorbanan yang tinggi dalam tujuan perubahannya, (b) beroperasi dengan cara-cara yang menyimpang dari pola-pola tradisional, (c)

membela dirinya dari serangan-serangan dan kecaman, (d) mempengaruhi keputusan-keputusan di dalam bidang fungsionalnya dan (e) memperbesar dan memperluas jangkauan tindakannya

5. efek sebaran, tingkat sejauhmana teknologi-teknologi, norma-norma, atau pola-pola yang inovatif yang diperjuangkan oleh lembaga telah diterima dan terpadu dalam kegiatan yang sedang berjalan dari organisasi-organisasi lainnya.

Berdasarkan hasil akhir dari proses pelebagaan, maka dikembangkan indikator dari pelebagaan LPMD di Kabupaten Rembang yaitu :

- Tingkat kemampuan LPMD dalam merencanakan dan melaksanakan program
- Tingkat kemandirian LPMD
- Tingkat kemampuan LPMD berinteraksi dengan lingkungan
- Tingkat dukungan masyarakat terhadap LPMD

C. Struktur Intern

Setiap organisasi, termasuk organisasi yang sudah melembaga, harus mencapai kompetensi teknis dalam semua komponennya dan kepaduan yang efektif di antara komponen-komponen tersebut. Kebutuhan untuk menjamin keterpaduan demikian dimasukkan dalam suatu kelompok variabel-variabel yang disebut struktur intern.

Menurut Milton J Esman dalam Joseph W Eaton (1986 : 25), struktur intern dirumuskan sebagai struktur dan proses-proses yang diadakan untuk bekerjanya lembaga tersebut dan bagi pemeliharaannya. Pembagian dari peranan-peranan di

dalam organisasi tersebut, pola-pola wewenang internnya dan sistem-sistem komunikasinya, komitmen dari orang-orangnya pada doktrin dan program dari organisasi tersebut akan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah diprogram.

Struktur intern mencakup pola-pola wewenang formal dan informal, pembagian kerja diantara komponen-komponen, saluran-saluran komunikasi di antara mereka dan metode-metode penengahan dan pemecahan dari perselisihan-perselisihan yang pasti akan timbul mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan, prioritas-prioritas, alokasi-alokasi sumber daya dan bahkan mengenai kepribadian-kepribadian dalam tiap struktur sosial yang kompleks.

Menurut James L Gibson (1992 : 324) struktur itu bertautan dengan hubungan yang relatif pasti yang terdapat di antara pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi. Hubungan yang pasti itu timbul dari proses hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembagian kerja (*division of work*) yaitu bahwa di dalam organisasi itu harus ada pembagian kerja yang jelas bagi para anggotanya. Pembagian kerja ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh para anggota supaya dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal
- b. Departementalisasi (*departmentalization*) artinya dari pekerjaan individu yang telah dibagi atas spesifikasi tugas tadi dikelompokkan kembali menjadi suatu kelompok kerja agar dalam pengontrolan pekerjaan akan lebih mudah dan terarah
- c. Rentang kendali (*span of control*) yaitu ukuran yang tepat bagi kelompok untuk melapor kepada atasan tertentu terhadap hasil kerja yang telah dicapai

d. Delegasi (*delegation*) yaitu wewenang yang telah dibagi-bagikan dan dimiliki oleh individu atau kelompok dalam organisasi untuk melakukan pekerjaannya.

Sementara S. Pradjudi Atmosudiro dalam Malayu SP Hasibuan (1999 : 27) menyatakan bahwa “ struktur yang ada dalam organisasi merupakan salah satu unsur adanya suatu organisasi”. Artinya organisasi tersebut baru dikatakan ada atau berfungsi bila dalam organisasi itu terdapat strukturnya, dimana struktur itu bukan hanya merupakan susunan keorganisasian saja tetapi bagaimana struktur yang dibuat itu dapat berfungsi dan berjalan untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Oleh karena itu dalam struktur itu harus ada kejelasan tugas dan wewenang oleh masing-masing bagian yang ada dalam struktur itu.

Sedangkan menurut Stephen P Robbins (2002 : 132) disebutkan bahwa struktur organisasi adalah menetapkan cara tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal. Ada enam unsur kunci dalam struktur organisasi, yaitu :

- 1) spesialisasi kerja, yaitu suatu tingkat di mana tugas dalam organisasi dibagi-bagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah
- 2) departementalisasi, yaitu dasar yang dipakai untuk mengelompokkan bersama sejumlah pekerjaan
- 3) rantai komando, yaitu garis yang tidak putus dari puncak organisasi ke yang paling bawah dan memperjelas siapa melapor kepada siapa
- 4) wewenang, yaitu hak-hak yang inheren dalam suatu posisi manajerial untuk memberikan perintah dan mengharapkan dipatuhinya perintah itu

- 5) kesatuan komando, yaitu seorang bawahan hanya mempunyai satu atasan kepada siapa ia bertanggungjawab secara langsung
- 6) rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat diarahkan secara efisien dan efektif oleh seorang manajer

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dikembangkan indikator dari struktur intern dalam proses pelebagaan yaitu :

- Kejelasan pembagian pekerjaan
- Departementalisasi
- Rentang kendali
- Kejelasan wewenang yang dimiliki oleh para anggota

D. Sumber-Sumber Daya

Sumber daya dalam lembaga adalah masukan-masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi, dan penerangan dari lembaga tersebut (Eaton, 1986 : 25). Menurut Henry Simamora (1992), sumber daya mempunyai empat tipe, yaitu :

- b) Finansial, yaitu sumber-sumber yang berkaitan dengan keuangan
- c) Fisik, yaitu sumber-sumber yang berhubungan sesuatu yang berupa fisik misal gedung, peralatan dan sebagainya
- d) Manusia, yaitu sumber-sumber yang berhubungan dengan kemampuan dan ketrampilan manusianya

- e) Kemampuan teknologi dan sistem, yaitu sumber-sumber yang berhubungan dengan teknologi yang dimiliki oleh lembaga itu juga kemampuan sistem dalam organisasi itu.

Menurut Norman T Uphoff dan Warren F Ilchman dalam Joseph W Eaton (1986 : 130), sumber-sumber daya organisasi meliputi :

- 1) Sumber-sumber daya ekonomi, meliputi barang-barang dan jasa-jasa
- 2) Informasi yang jelas
- 3) Status
- 4) Kekuatan, harus dimaksudkan sebagai sumber daya untuk membuat orang-orang tunduk pada keputusan organisasi.
- 5) Wewenang
- 6) Keabsahan
- 7) Dukungan

Dalam organisasi perlu ada pengaturan terhadap pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan. GR Terry dalam Malayu SP Hasibuan (1999 : 3). Maksudnya adalah walaupun dalam organisasi itu terdapat banyak sumber daya namun sumber daya harus dimanfaatkan dan diolah secara optimal untuk mencapai tujuannya sehingga tidak terbuang sia-sia.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini untuk mengukur variabel sumber daya dipergunakan indikator sebagai berikut :

- Kemampuan SDM pengurus dan anggota LPMD
- Besarnya dana yang dimiliki LPMD

- Sumber daya informasi yang dimiliki LPMD
- Kondisi fisik yang dimiliki LPMD

E. Kaitan yang memungkinkan

Kaitan yang memungkinkan adalah kaitan lembaga dari organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok sosial yang mengendalikan alokasi wewenang dan sumber-sumber daya yang diperlukan oleh lembaga tersebut untuk berfungsi. Dalam kaitan memungkinkan menyediakan wewenang untuk bekerja dan mencapai sumber-sumber daya yang esensial. Kaitan-kaitan yang memungkinkan juga dapat digunakan untuk melindungi organisasi tersebut terhadap serangan dan untuk menjamin pencapaiannya ke sumber-sumber daya selama masa yang kritis sementara ia membangun kemampuan-kemampuannya, tetapi belum cukup kuat untuk menghadapi lingkungan eksteralnya atas dasar keinginannya sendiri. Dengan sendirinya pemimpin-pemimpin lembaga yang bijaksana akan mengusahakan kaitan-kaitan yang memungkinkan mereka ini, tetapi tidak sampai titik di mana mereka merusak atau tidak berhasil membangun sumber-sumber dukungan dengan dasar yang lebih luas (Joseph W Eaton, 1986 : 37). Menurut Jiri Nehnevasa dalam Joseph W Eaton (1986 : 94) kaitan yang memungkinkan berkisar tentang masalah-masalah (a) apakah lembaga tersebut akan didirikan atau dipertahankan setelah didirikan dan (b) jenis-jenis sumber daya apa, kapan dan bagaimana akan diterima secara sah dan dari siapa. Karenanya, kaitan-kaitan yang memungkinkan ini menghubungkan lembaga ke badan-badan atau orang-orang yang membawahnya. Karenanya, jenis lembaga-lembaga ini pada

dirinya sendiri adalah titik pusat analisis bila kita ingin mengerti suatu lembaga yang menghubunginya dalam arti yang memungkinkan ini. Hal ini demikian adanya karena lembaga bertanggungjawab kepada mereka. Penarikan kembali dukungan tidak hanya akan menyulitkan atau malah mungkin tidak dapat sama sekali pencapaian dari tujuan-tujuan lembaga, tetapi juga mengancam identitas dari lembaga tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut, jika dikaitkan dengan proses pelembagaan LPMD, maka kaitan-kaitan yang memungkinkan adalah kaitan lembaga LPMD dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga lain yang ada di desa. Kaitan dengan Pemerintah Kabupaten karena LPMD merupakan implementasi dari suatu produk kebijakan yaitu Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa Rukun Tetangga dan Rukun Warga sekaligus Pemerintah menyediakan beberapa sumber daya diantaranya adalah dana.

Kaitan dengan pemerintah desa karena LPMD merupakan mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Menurut Keputusan Bupati Rembang Nomor 565 Tahun 2002 Pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Kaitan dengan lembaga lain yang ada di desa karena calon-calon pengurus LPMD sebagaimana dimaksud di atas diusulkan oleh RT dan dipilih oleh Badan Perwakilan desa, Pemerintah Desa dan RT. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya

LPMD tidak mungkin terlepas dari lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa.

Indikator untuk mengetahui seberapa besar tingkat kaitan yang memungkinkan adalah :

- Wewenang yang telah diberikan oleh Pemda kepada LPMD
- Kerja sama LPMD dengan Pemerintah Desa
- Kerja sama LPMD dengan lembaga lain yang ada di desa
- Kerja sama LPMD dengan tokoh masyarakat

F. Hubungan antar Variabel

1. Hubungan antara struktur intern dengan tingkat pelebagaan LPMD

Organisasi yang sudah melembaga, harus mencapai kompetensi teknis dalam semua komponennya dan kepaduan yang efektif di antara komponen-komponen tersebut. Kompetensi teknis dan kepaduan yang efektif dari komponen-komponen tersebut meliputi kejelasan pembagian pekerjaan, departementalisasi, rentang kendali dan kejelasan wewenang yang dimiliki oleh para anggota

Di samping struktur yang ada dalam organisasi merupakan salah satu unsur adanya suatu organisasi". Artinya organisasi tersebut baru dikatakan ada atau berfungsi bila dalam organisasi itu terdapat strukturnya, dimana struktur itu bukan hanya merupakan susunan keorganisasian saja tetapi bagaimana struktur yang dibuat itu dapat berfungsi dan berjalan untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Oleh karena itu nampak bahwa supaya

organisasi tersebut dapat terlembagakan maka organisasi tersebut harus berfungsi dengan baik, dimana supaya berfungsi dengan baik diperlukan struktur intern dan segala proses yang ada dalam struktur tersebut.

2. Hubungan antara sumber daya dengan tingkat pelebagaan LPMD

Besarnya dan mutu dari sumber-sumber daya yang tersedia merupakan determinan-determinan yang penting bagi efektifnya suatu organisasi. Sumber-sumber daya dapat dipandang sebagai masukan-masukan yang oleh organisasi diubah menjadi produk-produk atau jasa –jasa atau yang digunakan untuk menambah kemampuannya sendiri. Oleh karena itu sumber daya yang ada dalam setiap organisasi sangat mempengaruhi hasil akhir suatu organisasi sehingga sangat menentukan apakah nantinya organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya atau tidak. Jika organisasi dapat mencapai tujuannya dengan optimal maka besar kemungkinan organisasi tersebut dapat segera terlembagakan.

3. Hubungan antara kaitan yang memungkinkan dengan tingkat pelebagaan LPMD

Suatu organisasi tidak berada dalam suatu isolasi. Untuk menjadi organisasi yang terlembagakan ia harus menetapkan dan memelihara suatu jaringan dari kelengkapan-kelengkapan dalam lingkungannya untuk tetap hidup dan berfungsi, karena memang suatu organisasi tidak terlepas dari kesaling ketergantungan dengan bagian-bagian masyarakat sebagai penyedia sumber daya. Untuk itu hubungan yang baik dan dukungan yang tinggi dari lembaga-

lembaga lain di luar organisasi itu sangat diperlukan agar organisasi tersebut dapat memperoleh dukungan, mengatasi perlawanan dan akhirnya organisasi tersebut dapat diterima oleh lingkungan eksternalnya. Manakala organisasi tersebut dapat diterima oleh lingkungan eksternalnya maka organisasi tersebut telah dapat melembaga dengan baik.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat / jawaban yang masih lemah dan bersifat sementara, oleh karena itu perlu diuji kebenarannya melalui penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

1. Hipotesis Minor

- a. H1 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara struktur intern (X1) terhadap tingkat pelebagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang
- b. H2 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara sumber daya (X2) terhadap tingkat pelebagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang
- c. H3 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kaitan yang memungkinkan (X3) terhadap tingkat pelebagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang

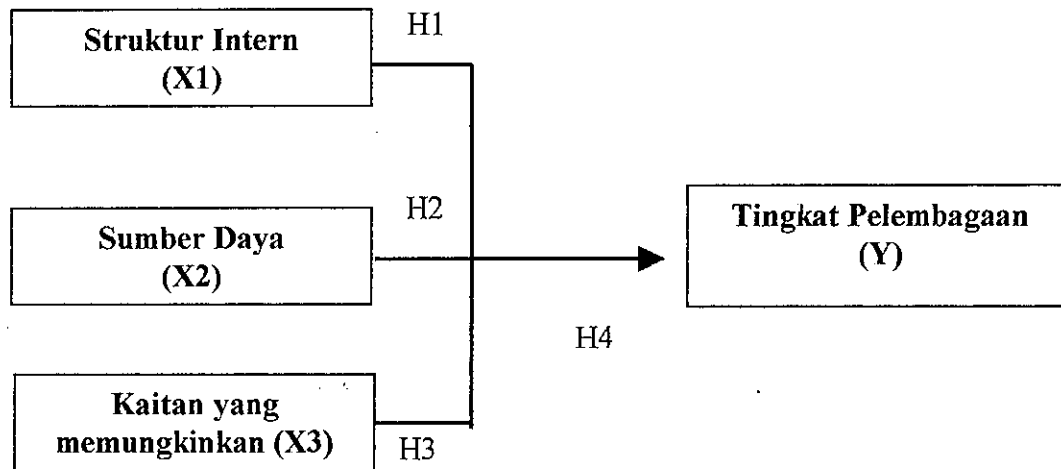
2. Hipotesis Mayor

- d. H4 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara struktur intern, sumber daya dan kaitan yang memungkinkan terhadap tingkat

pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di
Kabupaten Rembang

Selanjutnya secara sederhana hipotesis tersebut diilustrasikan sebagai

berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif analitik dan sifat penelitian ini adalah menerangkan (*explanation*) yang bertujuan menguji berbagai variabel penelitian yang terkait dengan hipotesis penelitian yang diajukan.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ditujukan untuk dapat mengungkapkan permasalahan yang diteliti. Untuk itu, metode pendekatan yang dianggap tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey deskriptif korelasional*. Singarimbun dan Effendi (1995: 3) mengemukakan bahwa metode *survei* adalah usaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi dari berbagai lembaga dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terpola dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan penelitian. Umumnya pengertian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi. Dengan demikian, penelitian survei merupakan proses penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok.

Pendekatan metode *deskriptif*, menurut Nazir (1985 : 65) adalah suatu metode untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, set kondisi, sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Sementara Surakhmad (1994: 68) mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang sifatnya menyelidiki permasalahan masa sekarang.

Pendekatan *korelasional* digunakan untuk proses pengujian atas hipotesis penelitian yang diajukan, yaitu sejauh mana variasi pada satu faktor berkaitan dengan variasi pada vaktor lainnya. Metode penelitian yang akan digunakan ini diharapkan mampu mengungkapkan permasalahan yang diteliti secara sistematis sehingga dapat diperoleh kebenaran atas permasalahan yang diteliti.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan melihat begitu luasnya permasalahan yang akan diteliti yaitu menyangkut analisis suatu lembaga yang relatif baru yaitu Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten Rembang, dan dengan mempertimbangkan keterbatasan penulis baik waktu maupun biaya, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan memusatkan perhatian pada sumber daya, struktur intern dan kaitan yang memungkinkan yang mempengaruhi proses pelebagaan organisasi tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rembang dengan populasi seluruh lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD). Karena unit analisis penelitian adalah lembaga, maka untuk mengetahui secara mendalam kondisi lembaga

sebagai responden adalah ketua lembaga atau sekretaris atau anggota LPMD yang lain yang dianggap mengetahui secara pasti kondisi dari lembaga tersebut.

D. Variabel Penelitian

D.1. Klasifikasi Variabel

Variabel Penelitian ini terdiri dari dua (2) jenis, yaitu : Variabel Bebas, dan Variabel Terikat :

a. Variabel Bebas, terdiri dari :

1. Sumber daya
2. Struktur Intern
3. Kaitan-kaitan yang memungkinkan

b. Variabel Terikat : Pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten Rembang

D.2. Definisi Konseptual

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari penelitian. Peranan konsep dalam penelitian sangat besar karena konsep menghubungkan dunia teori dengan dunia abstrak antara abstraksi dengan realita.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1989 : 34) konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah kejadian, keadaan atau individu tertentu :

Berdasarkan pengertian tersebut, maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

Pelebagaan dapat dirumuskan sebagai proses perencanaan, penataan dan bimbingan bagi organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali untuk mencapai tujuan-tujuannya sehingga akhirnya organisasi tersebut dan inovasi-inovasi yang dibawa oleh organisasi itu telah diterima dan didukung oleh lingkungan ekstern (masyarakat) .

Struktur intern, dapat dirumuskan sebagai struktur dan proses-proses yang diadakan untuk bekerjanya lembaga tersebut dan bagi pemeliharaannya. Pembagian dari peranan-peranan di dalam organisasi tersebut, pola-pola wewenang internnya dan sistem-sistem komunikasinya, komitmen dari orang-orangnya pada doktrin dan program dari organisasi tersebut akan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah diprogram.

Sumber-sumber daya, adalah masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi dan penerangan dari lembaga tersebut yang dapat mempengaruhi tiap segi dari kegiatan-kegiatan lembaga.

Kaitan-kaitan yang memungkinkan (*enabling*) adalah kaitan lembaga dari organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok sosial yang mengendalikan alokasi wewenang dan sumber-sumber daya yang diperlukan oleh lembaga tersebut untuk berfungsi.

D.3. Definisi Operasional

Unsur penelitian yang menjelaskan bagaimana cara mengukur suatu variabel menentukan indikator hal-hal khusus dari suatu variabel. Oleh karena itu apa yang telah dikemukakan dalam definisi konseptual akan lebih dekat dengan empiris. Di dalam penelitian, definisi konseptual harus dioperasionalkan dengan jalan mencari indikator-indikator dari masing-masing variabel yang ada.

Dengan demikian masing-masing variabel dapat dijelaskan dalam indikator sebagai berikut :

a. Variabel Pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang dengan indikator :

- 1) Tingkat kemampuan LPMD dalam merencanakan dan melaksanakan program
 - a) Jumlah program yang telah direncanakan oleh LPMD
 - b) Jumlah program yang telah dilaksanakan oleh LPMD
 - c) Tingkat keberhasilan penyelesaian program
- 2) Kemandirian LPMD
 - a) Tingkat kemandirian LPMD dalam menjalankan fungsi perencanaan pembangunan
 - b) Tingkat kemandirian LPMD dalam menjalankan fungsi penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan

- c) Tingkat kemandirian LPMD dalam menjalankan fungsi melaksanakan pembangunan
- 3) Kemampuan LPMD dalam berinteraksi
- a) Tingkat kemampuan LPMD dalam menyerap aspirasi masyarakat
 - b) Tingkat kemampuan LPMD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat
 - c) Tingkat kemampuan LPMD dalam berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Dukungan dari lingkungan
- a) Tingkat dukungan masyarakat terhadap LPMD
 - b) Tingkat dukungan Pemda terhadap LPMD
 - c) Tingkat dukungan lembaga lain di desa terhadap LPMD
 - d) Tingkat pemberdayaan LPMD oleh Pemda
- b. Variabel Struktur Intern dengan indikator :
- 1) Pembagian kerja
- a) Tingkat kejelasan pembagian kerja anggota LPMD
 - b) Spesifikasi pekerjaan yang harus dilaksanakan LPMD
 - c) Jumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- 2) Departementalisasi
- a) Tingkat heterogenitas pekerjaan yang dikelompokkan
 - b) Tingkat homogenitas pekerjaan yang dikelompokkan.
- 3) Rentang kendali
- a) Kesesuaian jumlah anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya

- b) Tingkat pola hubungan antara pimpinan dengan anggota
- c) Tingkat kontak antara pimpinan dan anggota
- 4) Kejelasan wewenang
 - a) Tingkat wewenang yang diberikan pimpinan kepada anggota
 - b) Tingkat partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan
- c. Variabel Sumber daya dengan indikator :
 - 1) Sumber daya manusia (SDM)
 - a) Tingkat dukungan pendidikan formal anggota LPMD
 - b) Tingkat dukungan pendidikan informal anggota LPMD
 - c) Tingkat kemampuan menyusun program
 - d) Tingkat kemampuan merealisasikan rencana program
 - 2) Sumber dana
 - a) Dana yang dimiliki LPMD
 - b) Tingkat kecukupan dana untuk operasional LPMD
 - c) Sumber dana yang diperoleh LPMD
 - 3) Informasi
 - a) tingkat kemudahan LPMD dalam memperoleh informasi
 - b) Tingkat akurasi informasi
 - 4) Kondisi fisik yang dimiliki LPMD
 - a) Kantor yang dimiliki oleh LPMD
 - b) Kualitas perlengkapan kantor yang dimiliki LPMD
 - c) Kelengkapan kantor yang dimiliki LPMD

- d. Kaitan yang memungkinkan dengan indikator :
- 1) Kewenangan yang diberikan Pemda
 - a) Tingkat kewenangan yang diberikan oleh pemda terhadap LPMD
 - b) Tingkat keberhasilan usulan LPMD yang disetujui oleh pemda
 - c) Tingkat kewenangan yang diberikan pemda dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa
 - 2) Kerjasama LPMD dengan Pemerintah Desa
 - a) Tingkat harmonis hubungan antara LPMD dengan Kepala desa dan perangkatnya
 - b) Tingkat frekuensi rapat antara LPMD dengan pemerintah desa
 - c) Tingkat dukungan pemerintah desa terhadap kegiatan LPMD
 - 3) Kerjasama LPMD dengan lembaga lain di desa
 - a) Tingkat harmonis hubungan antara LPMD dengan BPD
 - b) Tingkat dukungan BPD terhadap kegiatan LPMD
 - c) Tingkat harmonis hubungan antara LPMD dengan PKK
 - d) Tingkat dukungan PKK terhadap kegiatan LPMD
 - e) Tingkat dukungan RT dan RW terhadap kegiatan LPMD
 - f) Tingkat harmonis hubungan antara LPMD dengan lembaga lain
 - g) Tingkat dukungan lembaga lain terhadap kegiatan LPMD
 - 4) Kerjasama LPMD dengan lembaga lain di desa
 - a) Tingkat harmonis hubungan antara LPMD dengan tokoh masyarakat
 - b) Tingkat dukungan tokoh masyarakat terhadap kegiatan LPMD

E. Jenis dan Sumber Data

E.1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui daftar pertanyaan (kuesioner terstruktur) yang langsung diisi oleh responden pengurus LPMD, data primer lain diperoleh dari wawancara mendalam menggunakan *interview guide* dari responden narasumber yang terlibat dalam proses pelebagaan LPMD, yaitu : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Rembang, beberapa Kepala desa, Ketua BPD, Ketua TP PKK desa dan responden lain yang dianggap mengetahui proses pelebagaan LPMD. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, baik dari dokumen maupun publikasi yang menunjang pokok pembahasan penelitian.

E.2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yaitu (a) pengurus LPMD dan (b) aktor-aktor yang dianggap mengetahui proses pelebagaan LPMD di Kabupaten Rembang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah questioner terstruktur yang akan ditujukan kepada responden pengurus LPMD

dan wawancara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) kepada aktor-aktor yang mengetahui proses pelembagan LPMD.

G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi yang dikaji dalam penelitian ini adalah Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) se Kabupaten Rembang dengan jumlah 277 lembaga. Mengingat populasi yang relatif besar maka perlu diambil sampel penelitian.

Sampel penelitian ini sebanyak 57 lembaga LPMD. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik acak proporsi (*proportional random sampling*). Teknik proporsional random sampling adalah sampel diambil dari tiap bagian yang ditentukan secara seimbang dengan banyaknya subyek dalam masing-masing bagian dan setiap subyek dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

Di Kabupaten Rembang terdapat 14 kecamatan dan jumlah desa dan LPMD yang berbeda-beda, dengan jumlah seluruh populasi 277. Menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 124) jika populasi kurang dari 100 maka sampelnya minimal 30 %, dan jika lebih dari 100 maka sampelnya antara 5 % - 30 %. Dalam penelitian ini kami mengambil 20 % dari populasi.

Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar sampel pada penelitian

NO	Kecamatan	Jumlah LPMD	persentase	Jml sampel	Nama Desa
1.	Rembang	30	20 %	6	a. Pandean b. Pacar c. Gegunungkulon d. Waru e. Sumberrejo f. L e t e h
2.	Kaliori	21	20 %	4	a. Babadan b. Banggi c. Kuangsan d. Tunggulsari
3.	Sumber	18	20 %	4	a. Sumber b. J a d i c. Grawan d. Polbayem
4	Sulang	18	20 %	4	a. Kunir b. Karangharjo c. Pomahan d. Jatimudo
5.	B u l u	15	20 %	3	a. Mantingan b. Lambangan wetan c. Kadiwono
6	Pamotan	22	20 %	4	a. Segoromulyo b. Mlawat c. Tempaling d. Japerejo
7.	Gunem	15	20 %	3	a. Kulutan b. Telgawah c. Sambongpayak
8.	S a l e	15	20 %	3	a. Mrayun b. Wonokerto c. J o h o
9.	Lasem	18	20 %	4	a. Selopuro b. Sendangcoyo c. Karasgede d. Jolotundo

10.	Pancur	23	20 %	5	a. Tuyuhan b. Jeruk c. Kalitengah d. Sidowayah e. Japeledok
11.	Sluke	13	20 %	3	a. Sendangmulyo b. Jatisari c. Manggar
12	Kragan	25	20 %	5	a. Tanjungan b. Kragan c. Balongmulyo d. Karanglincak e. Pandangan kulon
13.	Sarang	23	20 %	5	a. Lodan Wetan b. Sampung c. Bonjor d. Tawangrejo e. Kalipang
14	Sedan	21	20 %	4	a. Mojosari b. Karas c. Sidomulyo d. Ngulangan
	Jumlah	277	20 %	57	

H. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam kegiatan penelitian adalah dengan menggunakan pertanyaan terstruktur (kuesioner) dan pedoman wawancara. Pertanyaan terstruktur ditujukan untuk mengumpulkan data dari responden, sedangkan pedoman wawancara dilakukan untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan substansi penelitian dari informan.

Pertanyaan terstruktur melalui alat bantu kuesioner berisikan item-item pertanyaan yang dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban yang sudah

tersedia untuk dijawab oleh responden sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berisikan beberapa pertanyaan yang memuat garis besar tentang substansi penelitian yang akan ditanyakan kepada informan untuk mempertajam analisis pembahasan.

Selain teknik pengumpulan data di atas, dilakukan pula pengambilan data sekunder dengan cara menggali dan mencari beberapa dokumen atau catatan penting dari instansi terkait, serta publikasi beberapa hasil penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan substansi penelitian.

I. Teknik Analisis Data

I.1. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul masih merupakan data mentah, untuk itu perlu diproses lebih lanjut melalui teknik pengolahan data, meliputi :

1. Editing, yaitu pekerjaan mengoreksi atau meneliti kembali dari keseluruhan data yang telah diperoleh untuk mengetahui lengkap tidaknya pengisian, keterbacaan dan relevansi jawaban.
2. Coding, yaitu usaha untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden menurut macamnya atau jenisnya dengan jalan memberi tanda masing-masing jawaban dengan tanda atau kode-kode tertentu.

3. Tabulating, yaitu proses menyusun kembali data-data ke dalam suatu bentuk tabel-tabel. Dalam tabulasi ini jawaban yang serupa di kelompokkan dengan teliti dan teratur, kemudian dihitung berapa banyak peristiwa atau gejala yang termasuk dalam satu kategori.

I.2. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik :

1. Analisis Kuantitatif, digunakan untuk data yang berbentuk angka. Biasanya apabila data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori angka. Dalam penelitian ini digunakan skala pengukuran Likert dengan ukuran ordinal, dimana jawaban responden diwakili dengan skor. Skor yang lebih besar menunjukkan intensitas jawaban responden yang semakin positif (mendukung) atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.
2. Analisis Kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan kata-kata dan kalimat untuk menjelaskan sesuatu hal guna mempertajam analisis kuantitatif.
3. Teknik Pengujian Hipotesis

Teknik Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan :

Koefisien Rank Kendall

Karena peneliti ingin melihat hubungan yang terjadi antara satu variabel dengan variabel lainnya yang masing-masing merupakan gejala ordinal. Derajat hubungan yang terjadi dinamakan *korelasi*.

Dimana bila salah satu variabel mempunyai nilai naik yang lain turun, maka kedua variabel tersebut mempunyai korelasi negatif. Sedang bila keduanya mempunyai nilai naik atau turun, maka kedua variabel tersebut mempunyai korelasi positif. Rumus koefisien korelasi Rank Kendall adalah sebagai berikut :

$$T = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2} N(N-1) - T_x} \sqrt{\frac{1}{2} N(N-1) - T_y}}$$

Keterangan :

T = koefisien korelasi Rank Kendall.

S = jumlah observasi skore-skore +1 dan -1 untuk semua pasangan.

N = banyaknya obyek atau individu yang diurutkan pada X dan Y.

$T_x = 1/2 \sum (t - 1)$, t = banyaknya observasi berangka sama pada X.

$T_y = 1/2 \sum (t (1)$, t = banyaknya observasi berangka sama pada Y.

Uji Signifikasi

$$S = \frac{T}{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}$$

Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis :

- Jika Z hitung > Z t1% , sangat signifikan.
- Jika Z hitung > Z t5% , signifikan
- Jika Z hitung < Z t5% , tidak signifikan.

Koefisien Korelasi Partial Kendall

Rumus ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai hubungan murni dengan variabel tergantung.

$$\tau_{XYZ} = \frac{\tau_{XY} - \tau_{ZY} - \tau_{XZ}}{(1 - ZY^2)(1 - ZX^2)}$$

Keterangan :

τ_{XYZ} = Koefisien korelasi ranking partial Kendall.

τ_{XY} , τ_{ZY} , τ_{XZ} = dicari dengan rumus Tau.

Koefisien Konkordansi Kendall

Rumus ini digunakan untuk mengetahui asosiasi dari variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan.

$$W = \frac{S}{\frac{1}{2}k^2(N^3 - N) - k \cdot \sum \tau}$$

Keterangan :

W = Koefisien konkordansi Kendall

S = Jumlah kuadrat deviasi dari R1

Jadi S dapat dicari dengan rumus :

$$S = (R_j - R_j / N)^2$$

K = banyaknya variabel

N = banyaknya obyek

T = faktor koreksi angka sama, yang diperoleh dari :

$$\tau = \sum \frac{(t^3 - t)}{12}$$

$$X^2 = k (N - 1) W$$

Rumus ini digunakan untuk menentukan apakah harga W observasi secara signifikan berbeda dari nol. Karena $N > 7$, maka rumus tersebut digunakan. Setelah ditemukan harga X^2 dengan $db = N - 1$, dapat diuji dengan memakai tabel X^2 . Jika harga X^2 sama atau lebih besar dari harga yang ditunjukkan dalam tabel pada taraf signifikansi 95% maka hipotesa diterima (Sidney Siegel, 1985 : 269-289).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Kondisi geografis dan demografis

Sebelum menjawab tujuan dari penelitian ini, terlebih dahulu akan dipaparkan gambaran umum tentang lokasi penelitian dan organisasi Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang.

Kabupaten Rembang sebagai salah satu kabupaten di wilayah Republik Indonesia terletak di antara $111^{\circ} 00' - 111^{\circ} 30'$ BT dan $6^{\circ} 30' - 7^{\circ} 60'$ LS yang sebagian wilayah merupakan daerah pantai yang membujur sepanjang pantai utara pulau Jawa kurang lebih 60 km mempunyai luas 1.014,08 Km² dengan batas sebagai berikut :

- sebelah utara : Laut Jawa
- sebelah barat : Kabupaten Pati
- Sebelah selatan : Kabupaten Blora
- Sebelah timur : Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur

Jumlah penduduk di Kabupaten Rembang sampai bulan 30 Juni 2004 sebanyak 582.037 jiwa yang terdiri dari laki-laki 290.583 jiwa dan perempuan 291.454 jiwa.

Secara ekonomi, potensi yang ada di Kabupaten Rembang meliputi sektor kelautan, pertanian, pertambangan, kerajinan dan lainnya. Sehingga untuk

mata pencaharian penduduk di Kabupaten Rembang cukup beragam mulai dari nelayan, petani, kerajinan dan sebagainya.

2. Gambaran Umum Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa

Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Dalam pembentukan LPMD di Kabupaten Rembang diatur oleh Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dalam rangka mewujudkan demokrasi di Desa/kelurahan yang berfungsi sebagai Lembaga Kemasyarakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maka di setiap desa/kelurahan dapat dibentuk LPMD.

Dalam perda tersebut disebutkan bahwa desa dapat membentuk LPMD untuk mewujudkan demokrasi di desa sebagai lembaga kemasyarakatan. Tata cara pembentukan dan susunan organisasi LPMD ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana pengurus LPMD dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai peranan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Calon-calon pengurus LPMD diusulkan oleh RT dan dipilih oleh Badan Perwakilan desa, Pemerintah Desa dan RT.

Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
- b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat

c. melaksanakan pembangunan

Dalam melaksanakan tugasnya LPMD mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa atau kelurahan
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan
- c. pengkoordinasian perencanaan Lembaga Kemasyarakatan
- d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu
- e. penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk desa dan kelurahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LPMD dapat terdiri dari

- a. ketua
- b. wakil ketua
- c. sekretaris
- d. bendahara
- e. seksi-seksi

Seksi-seksi :

- Kesejahteraan rakyat
- Keamanan
- Pendidikan dan kebudayaan
- Ekonomi dan pembangunan
- Pemuda dan olah raga
- Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian kami di 57 desa/kelurahan didapatkan hasil bahwa untuk jumlah pengurus LPMD antara desa satu dengan yang lain berbeda. Perbedaan jumlah pengurus ini ditentukan oleh jumlah seksi yang ada dalam LPMD berbeda-beda. Untuk jumlah seksi yang ada pada LPMD lokasi penelitian di Kabupaten Rembang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4
Jumlah seksi dalam LPMD

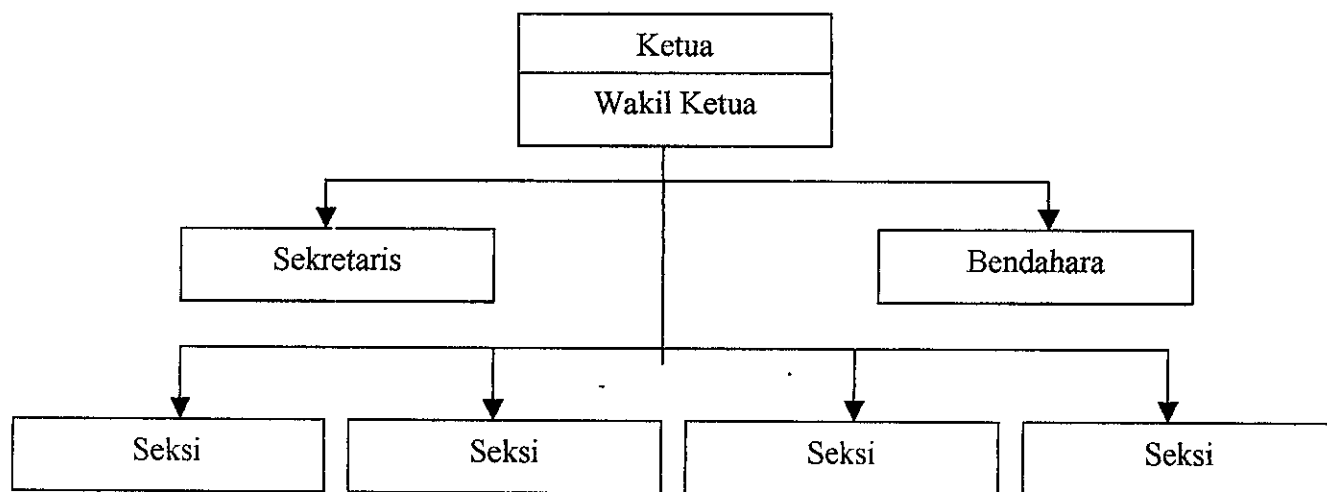
No	Jumlah seksi	Jumlah	Persentase
1.	2 seksi	1	1.75
2.	3 seksi	2	3.5
3.	5 seksi	9	15.8
4.	6 seksi	31	54.4
5.	7 seksi	8	14.03
6.	8 seksi	3	5.3
7	9 seksi	1	1.75
8	10 seksi	2	3.5
	Jumlah	57	100 %

Sumber : data primer, diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas nampak bahwa jumlah seksi yang ada di tiap tiap LPMD berbeda, paling sedikit 2 buah yaitu di desa Babadan Kecamatan Kaliori yaitu seksi agama dan pembangunan. Sedangkan paling banyak 10 seksi di Desa Sampung Kecamatan Sarang yang seksinya sama persis dengan LKMD dulu. Sementara mayoritas jumlah seksi sebanyak 6 buah sesuai dengan perda nomor 5 Tahun 2002.

Adapun struktur organisasi dalam LPMD sebagai berikut :

Gambar 4
Struktur organisasi Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa



Sumber : PERDA Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002

Sedangkan untuk pendidikan pengurus LPMD di lokasi penelitian, tingkat pendidikan pengurus LPMD masih rendah, seperti tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5
Tingkat pendidikan pengurus LPMD

No	Jenjang pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	89	15.5 %
2.	SLTP	256	44.5 %
3.	SLTA	150	26.1 %
4.	Diploma	50	8.7 %
5.	Sarjana	30	5.2 %
	Jumlah	575	100 %

Sumber : data primer, diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tingkat pendidikan formal yang dimiliki pengurus LPMD belum baik, 60 % pengurus hanya mempunyai pendidikan dasar (SD dan SLTP), sementara yang memiliki pendidikan tinggi (diploma dan sarjana) sebanyak 13,9 %. Selebihnya mempunyai pendidikan setingkat SLTA.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner dari 57 responden atas 59 pertanyaan tentang pelebagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang, yang meliputi variabel-variabel pelebagaan, struktur intern, sumber daya dan kaitan yang memungkinkan diperoleh hasil sebagai berikut :

B.1. Variabel pelebagaan

Variabel pelebagaan yang meliputi tingkat kemampuan LPMD dalam merencanakan dan melaksanakan program, kemandirian LPMD, kemampuan LPMD dalam berinteraksi dan dukungan dari lingkungan didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Kemampuan LPMD

Tabel 6
Kemampuan LPMD

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	12	21,1
2.	Rendah	28	49,1
3.	Tinggi	13	22,8
4.	Sangat tinggi	4	7,0
Total		57	100 %

Sumber : jawaban pertanyaan kuesioner no. 3

Berdasarkan tabel tersebut di atas didapatkan bahwa kemampuan LPMD dalam menyelesaikan program masih rendah. Tercatat 28 responden atau 49,1 % mengatakan tingkat keberhasilan menyelesaikan program masih rendah, 12 responden atau 21,1 % mengatakan sangat rendah, hanya 13 responden yang menyatakan tinggi dan 4 responden mengatakan sangat tinggi. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 1 dan 2 tentang jumlah program yang telah direncanakan serta yang telah dan sedang dilaksanakan terlihat bahwa belum banyak LPMD yang mempunyai rencana kerja apalagi tahap pelaksanaannya. Hal ini dapat diartikan bahwa LPMD di Kabupaten Rembang belum mampu untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di desa. Hambatan-hambatan yang ada karena LPMD merupakan lembaga yang baru dan kurangnya sumber dana yang ada.

Tabel 7
Jumlah kegiatan yang direncanakan LPMD

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak memiliki	30	52,6
2.	1 – 2 program	19	33,3
3.	3 – 4 program	6	10,5
4.	Lebih dari 4	2	3,5
Total		57	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa sebagian besar LPMD di Kabupaten Rembang belum memiliki program kerja. Program kerja yang ada di desa bukan merupakan inisiatif LPMD namun inisiatif pemerintah desa. Terlihat bahwa 52,6 %

LPMD tidak memiliki program kerja, 33,3 % memiliki 1 – 2 program, dan hanya 3,5 % yang memiliki lebih dari 4 program kerja.

Tabel 8
Jumlah program yang telah dan sedang dilaksanakan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak memiliki	35	61,4
2.	1 – 2 program	15	26,3
3.	3 – 4 program	6	10,5
4.	Lebih dari 4	1	1,8
Total		57	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja LPMD sangat rendah. Hal ini terbukti dari 61,4 % responden mengatakan bahwa LPMD di Kabupaten Rembang belum melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya dana yang dimiliki oleh LPMD dan rendahnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2. Kemandirian LPMD

Tabel 9
Kemandirian LPMD dalam perencanaan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	6	10,5
2.	Rendah	30	52,6
3.	Tinggi	19	33,3
4.	Sangat tinggi	2	3,5
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 5

Tingkat kemandirian LPMD diindikasikan sebagai kemampuan LPMD untuk merencanakan kegiatan secara mandiri. Berdasarkan tabel tersebut didapatkan hasil bahwa tingkat kemandirian LPMD dalam menjalankan fungsi perencanaan tergolong masih rendah, 52,6 % responden menjawabnya demikian. Bahkan 10,5 % menjawab sangat rendah, hal ini menunjukkan bahwa LPMD belum mampu membuat rencana kegiatan dalam pembangunan desa, banyak rencana kegiatan yang dibuatkan oleh pihak kecamatan. Kemudian yang menjawab tinggi dan tinggi sekali sebesar 33,3 % dan 3,5 %, hal ini disebabkan pengurus LPMD merupakan pengurus lama LKMD sehingga telah mampu mengetahui tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Tabel 10
Tingkat kemandirian LPMD dalam fungsi penggalian dan pemanfaatan sumber daya pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	4	7,0
2.	Rendah	35	61,4
3.	Tinggi	16	28,1
4.	Sangat tinggi	2	3,5
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 6

Dalam fungsi penggalian dan pemanfaatan sumber daya pembangunan, LPMD menunjukkan kinerja yang belum menggembirakan, tercatat 35 responden menjawab rendah. Rendahnya tingkat kemandirian ini erat kaitannya dengan kemampuannya dalam menemukan permasalahan yang ada dalam masyarakat, menentukan alternatif pemecahan masalah dan merumuskan rencana program yang sesuai dengan

aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Hanya 18 responden yang telah mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang ada di desanya untuk melaksanakan pembangunan.

Tabel 11
Tingkat kemandirian LPMD dalam fungsi pelaksanaan pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	8	14,1
2.	Rendah	37	64,9
3.	Tinggi	10	17,5
4.	Sangat tinggi	2	3,5
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 7

Dalam pelaksanaan pembangunan yang menjadi tugas pokok LPMD, didapatkan hasil bahwa LPMD yang ada di Kabupaten Rembang masih rendah. Sebanyak 37 responden atau 64,9 % mengatakan demikian. Hal ini erat kaitannya dengan dukungan sumber dana yang dimiliki oleh LPMD yang hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Bahkan 8 responden atau 14 % menyatakan bahwa LPMD sangat rendah dalam menjalankan fungsi ini. Hal ini menunjukkan bahwa LPMD tersebut belum berfungsi sama sekali dalam menjalankan fungsi pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan beberapa kepala desa pelaksanaan pembangunan yang ada di desanya bukan merupakan hasil dari perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh LPMD.

3. Kemampuan LPMD dalam berinteraksi

Tabel 12
Tingkat kemampuan LPMD dalam menyerap aspirasi masyarakat

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	4	7,0
2.	Rendah	39	68,4
3.	Tinggi	14	24,6
4.	Sangat tinggi	-	-
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 9

Dalam menyerap aspirasi dari masyarakat, terlihat bahwa 39 responden atau 68,4 % menjawab rendah, artinya kemampuan LPMD dalam menyerap aspirasi dari masyarakat belum optimal. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh pengurus LPMD, kurang peka nya pengurus LPMD dalam menemukan masalah yang ada dan jarang nya dilaksanakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Sehingga LPMD tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Sebaliknya dari sisi masyarakat aspirasi yang dimilikinya jarang yang disampaikan kepada LPMD tetapi sering langsung ke pada kepala desa atau BPD. Sedangkan 7 % responden menyatakan LPMD sangat rendah kemampuannya menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. Hal ini menunjukkan LPMD belum berfungsi sama sekali.

Tabel 13
Tingkat kemampuan LPMD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	3	5,3
2.	Rendah	36	63,2
3.	Tinggi	18	31,6
4.	Sangat tinggi	-	-
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 10

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa sebanyak 36 responden mengatakan kemampuan LPMD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat masih rendah. Hal ini disebabkan di desa sendiri jarang dilakukan musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDES). Sehingga tidak ada wadah dalam menyalurkan aspirasi tersebut. Disamping itu kemampuan LPMD dalam membangun jaringan informasi dengan lembaga yang ada di atas masih rendah sehingga belum banyak aspirasi yang dapat sampai kepada pengambil kebijakan.

Tabel 14
Tingkat kemampuan LPMD dalam berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	2	3,5
2.	Rendah	35	61,4
3.	Tinggi	19	33,3
4.	Sangat tinggi	1	1,8
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 11

Tingkat kemampuan LPMD dalam berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencana dan pelaksana pembangunan serta menggerakkan swadaya gotong royong masih rendah. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh responden, sebanyak 61,4 % mengatakan demikian. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan LPMD dengan masyarakat belum dapat berjalan dengan baik, artinya LPMD jarang sekali melakukan hubungan dengan masyarakat baik melalui rapat-rapat di tingkat RT. Maupun dalam kegiatan informal seperti kegiatan agama, pengajian, arisan dan sebagainya. LPMD belum mampu mempromosikan dirinya sebagai lembaga perencana dan pelaksana pembangunan.

4. Dukungan dari lingkungan

Tabel 15
Dukungan masyarakat terhadap LPMD

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	2	3,5
2.	Rendah	39	68,4
3.	Tinggi	14	24,6
4.	Sangat tinggi	2	3,5
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 13

Dukungan masyarakat terhadap LPMD masih tergolong rendah. Dari jawaban responden menunjukkan 68,4 % dukungan masyarakat terhadap keberadaan LPMD rendah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang percaya kepada kemampuan LPMD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Dalam merencanakan

pembangunan biasanya mereka mengusulkan langsung kepada kepala desa dan dalam pelaksanaannya mereka membentuk panitia tersendiri. Masyarakat belum mengetahui tugas dan fungsi LPMD dengan baik karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan LPMD sendiri. Sebanyak 3,5 % responden bahkan mengatakan sangat rendah artinya mereka tidak mempedulikan adanya LPMD

Tabel 16
Tingkat dukungan pemerintah daerah terhadap LPMD

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	3	5,3
2.	Rendah	35	61,4
3.	Tinggi	16	28,1
4.	Sangat tinggi	3	5,3
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 14

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pendapat para responden terhadap dukungan pemerintah kabupaten terhadap LPMD terlihat juga masih rendah. Pemerintah kabupaten menurut para responden hanya menyediakan bantuan yang nilainya sangat kecil lewat alokasi dana bantuan desa yang sebesar antara Rp 900.000,- - Rp 1.200.000,- per LPMD setiap tahunnya. Bantuan non materi yang diberikan oleh pemda juga masih rendah, seperti tidak adanya bantuan buku, pelatihan dan pembinaan. Sedangkan 28,1 % responden menyatakan telah ada perhatian dari pemerintah kabupaten untuk LPMD karena telah melakukan pembinaan. Hal ini

ketika ditanyakan kepada Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rembang menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada seluruh LPMD karena dana yang tersedia hanya sedikit. Bahkan pada tahun 2005 ini dana pembinaan LPMD tidak muncul dalam APBD.

Tabel 17
Tingkat dukungan lembaga lain

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	5	8,8
2.	Rendah	15	26,3
3.	Tinggi	33	57,9
4.	Sangat tinggi	4	7,0
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 15

Dukungan lembaga lain kepada keberadaan LPMD cukup tinggi. Berdasarkan tabel di atas 57,9 % responden menjawab dukungan tersebut tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga LPMD sebenarnya telah diakui dan diterima oleh lembaga lain seperti karang taruna, lembaga keagamaan, PKK dan sebagainya. Adapun LPMD yang kurang dapat diterima oleh lembaga lain biasanya oleh BPD dengan bukti belum semua LPMD memiliki peraturan desa.

Tabel 18
Tingkat pemberdayaan LPMD oleh Pemda

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	3	5,3
2.	Rendah	37	64,9
3.	Tinggi	15	26,3
4.	Sangat tinggi	2	3,5
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 16

Berdasarkan jawaban responden seperti nampak pada tabel di atas, terlihat bahwa 64,9 % responden mengatakan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap LPMD masih rendah. Hal ini terbukti bahwa pemda selama ini belum melakukan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan pengurus LPMD, belum melakukan pembinaan. LPMD yang menjawab tinggi kebetulan telah dibina oleh pemerintah daerah. Di samping itu penguatan kemampuan/pemberdayaan LPMD kurang karena banyak kegiatan pemda yang tidak melibatkan LPMD.

B.2. Variabel struktur intern

Variabel struktur intern yang mempengaruhi proses pelembagaan organisasi meliputi indikator-indikator pembagian kerja anggota LPMD, departementalisasi LPMD, rentang kendali dan kejelasan wewenang yang ada dalam LPMD dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

1. Pembagian Kerja

Tabel 19
Tingkat kejelasan pembagian kerja

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak jelas	1	1,8
2.	Kurang jelas	39	68,4
3.	Jelas	17	29,8
4.	Sangat jelas	-	-
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 19

Berdasarkan tabel tersebut di atas, kejelasan pembagian kerja anggota LPMD memang dirasakan masih belum jelas, sehingga banyak anggota LPMD yang bingung apa yang harus mereka kerjakan. Seperti disebutkan dalam tabel di atas 68,4 % responden menyatakan kurang jelas. Hal ini disebabkan karena pembentukan LPMD yang asal tunjuk dan jarang ada rapat kegiatan sehingga anggota LPMD kurang jelas apa yang harus mereka perbuat. Sebanyak 29,8 % menyatakan jelas karena sudah mendapat pembinaan dan kebanyakan merupakan pengurus LKMD yang dahulu sehingga mereka telah mengerti apa yang harus dikerjakan.

Tabel 20
Tingkat kesesuaian pekerjaan dengan ketrampilan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak sesuai	1	1,8
2.	Kurang sesuai	19	33,3
3.	Sesuai	33	57,9
4.	Sangat sesuai	4	7,0
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 20

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tingkat kesesuaian pekerjaan dengan ketrampilan sebenarnya cukup tinggi, 57,9 % menyatakannya demikian. Hal ini ditunjukkan dari seksi-seksi yang ada telah dipilih orang yang tahu bidangnya, misalnya seksi kesra dipikirkan orang yang mengetahui tentang agama (tokoh agama), seksi pendidikan dipikirkan guru, pemuda oleh pemuda sendiri dan sebagainya. LPMD yang menjawab belum sesuai karena sebenarnya di desa tersebut ada yang lebih pas namun mereka menolak untuk duduk di kepengurusan LPMD.

Tabel 21
Beban pekerjaan yang harus diselesaikan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat berat	-	-
2.	Berat	31	54,4
3.	Ringan	20	35,1
4.	Sangat ringan	6	10,5
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 21

Beban pekerjaan yang dilakukan oleh anggota LPMD dirasakan oleh pengurus LPMD cukup berat, hal ini disebabkan karena pembagian kerja yang tidak jelas, di samping sikap kritis masyarakat sekarang dalam mengawasi pembangunan dan semangat swadaya gotong-royong masyarakat yang mulai menipis sehingga akan sulit melaksanakan pembangunan. Berdasarkan jawaban para responden 54,4 % menyatakan berat dan 35,1 % menyatakan ringan, karena mereka telah mengerjakan bidang tugasnya sesuai bidangnya masing-masing dan mungkin juga mereka tidak mengetahui sama sekali tugas-tugasnya sehingga mereka menjawab ringan.

2. Departementalisasi

Tabel 22
Tingkat keberagaman pekerjaan yang dikelompokkan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak beragam	-	-
2.	Kurang beragam	24	42,1
3.	Beragam	29	50,9
4.	Sangat beragam	4	7,0
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 22

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tingkat keberagaman pekerjaan yang dikelompokkan terlihat bahwa 50,9% menyatakan beragam dan 7,0 % menyatakan sangat beragam. Hal ini berkaitan dengan jumlah seksi yang ada. LPMD yang jumlah seksinya lebih sedikit menyatakan demikian karena jenis pekerjaan yang di emban cukup banyak namun jumlah seksi yang terbatas. Sebaliknya yang kurang beragam sebanyak 42,1 % karena jumlah seksinya cukup banyak sehingga mampu membagi pekerjaan menjadi lebih spesifik ke dalam tiap-tiap seksi.

Tabel 23
Tingkat kesamaan pekerjaan yang dikelompokkan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak sesuai	1	1,8
2.	Kurang sesuai	24	42,1
3.	Sesuai	30	52,6
4.	Sangat sesuai	2	3,5
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 23

Pekerjaan-pekerjaan yang beragam namun telah dikelompokkan, jika ditinjau dari kesesuaiannya dengan seksi-seksi yang ada 53,6% responden menyatakan telah sesuai. Namun adapula yang merasa dipaksakan, artinya pekerjaan tersebut sebenarnya kurang sesuai dengan bidang tugasnya. Dari tabel tersebut yang menjawab demikian sebanyak 42,1 % dan 1,8 % menyatakan tidak sesuai.

3. Rentang kendali

Tabel 24
Tingkat kesesuaian jumlah anggota dengan tugas dan fungsi

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak sesuai	2	3,5
2.	Kurang sesuai	16	28,1
3.	Sesuai	33	57,9
4.	Sangat sesuai	6	10,5
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 24

Berdasarkan tabel di atas tingkat kesesuaian jumlah anggota dengan tugas dan fungsi LPMD di Kabupaten Rembang, 57,9 % responden telah menjawab sesuai, artinya dengan jumlah anggota yang ada maka diharapkan tugas dan fungsi LPMD dapat dijalankan dengan baik. Sedangkan 28,1 % responden mengatakan kurang sesuai artinya jumlah anggota dirasakan masih kurang jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi LPMD yang cukup berat. Hal ini diindikasikan dengan jumlah seksi yang kurang dapat mengakomodasikan seluruh kepentingan warga masyarakat.

Tabel 25
Pola hubungan antara pimpinan dengan anggota

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat buruk	2	3,5
2.	Buruk	30	52,6
3.	Baik	22	38,6
4.	Sangat baik	3	5,3
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 25

Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa merupakan lembaga yang dapat menampung aspirasi warga dalam pembangunan, oleh karena itu dalam pengambilan keputusan hendaknya melibatkan seluruh anggota, namun kenyataan yang ada sampai saat ini hubungan antara pimpinan dengan anggota belum berjalan dengan baik. Berdasarkan tabel di atas, pola hubungan antara pimpinan LPMD dengan anggotanya 52,6 % responden menyatakan buruk, artinya setiap keputusan yang diambil oleh LPMD belum melibatkan seluruh anggota. Keputusan yang diambil biasanya hanya merupakan inisiatif ketua dengan alasan karena mereka diminta untuk mengusulkan sesuatu dalam jangka waktu yang terbatas sehingga tidak sempat untuk mengumpulkan seluruh anggota.

Tabel 26
Frekuensi rapat antara pimpinan dan anggota

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak pernah	2	3,5
2.	Kadang-kadang	22	38,6
3.	Sering	29	50,9
4.	Sangat sering	4	7,0
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 26

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 5 Tahun 2002 Pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa LPMD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas dasar permintaan Kepala Desa secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, namun dalam perkembangannya belum semua telah melaksanakannya. LPMD yang sudah melaksanakannya dikategorikan sering dan sangat sering sebesar 50,9 % dan 7,0 % artinya LPMD tersebut telah melaksanakan rapat minimal dua kali dalam setahun, biasanya dalam rapat penyusunan DURK dana bantuan desa dan pelaksanaan kegiatan. Namun ada pula yang sangat jarang artinya kadang-kadang ataupun tidak pernah sebanyak 38,6 % dan 3,5 % dari responden.

3. Kejelasan wewenang

Tabel 27
Tingkat wewenang yang diberikan pimpinan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	1	1,8
2.	Rendah	33	57,9
3.	Tinggi	19	33,3
4.	Sangat tinggi	4	7,0
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 28

Berdasarkan pendapat dari responden, tingkat wewenang yang diberikan pimpinan kepada anggota LPMD di Kabupaten Rembang, 57,9 % menjawab rendah, artinya wewenang yang diberikan pimpinan kepada para seksi masih kurang, hal ini mengindikasikan pimpinan kurang berupaya untuk memberdayakan bawahannya, segala keputusan yang diambil kurang memperhatikan aspirasi dari seksi, dan pelaksanaan kegiatan kurang melibatkan seksi-seksi yang ada. Sedangkan yang tinggi sebesar 33,3 % artinya pimpinan telah berupaya untuk memberdayakan bawahannya.

Tabel 28
Tingkat partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	1	1,8
2.	Rendah	31	54,4
3.	Tinggi	21	36,8
4.	Sangat tinggi	4	7,0
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no.29

Tingkat partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, berdasarkan pendapat responden yang dinyatakan dalam tabel di atas 54,4 % menyatakan masih rendah, artinya anggota belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan wawancara kami dengan pengurus LPMD yang lain karena mereka tidak diundang dan LPMD didesak oleh waktu karena harus segera memberikan usulan. Sementara itu 36,8 % menjawab tinggi, artinya keputusan yang diambil telah melibatkan anggota melalui rapat yang demokratis.

B.3. Variabel sumber daya

Variabel sumber daya yang mempengaruhi proses pelebagaan LPMD ditentukan oleh indikator sumberdaya manusia yang ada di LPMD, sumber dana, sumber informasi dan kondisi fisik kantor yang dimiliki oleh LPMD. Berdasarkan jawaban responden didapat hasil sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Tabel 29
Tingkat dukungan pendidikan formal

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak mendukung	-	-
2.	Kurang mendukung	39	68,4
3.	Mendukung	10	17,5
4.	Sangat mendukung	8	14,0
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 30

Jika ditinjau dari pendidikan formal yang dimiliki oleh pengurus LPMD, menyatakan pendidikan formal yang dimiliki kurang mendukung LPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pendidikan formal yang dimiliki oleh para pengurus LPMD masih rendah sehingga kurang mendukung terhadap kegiatan LPMD. Berdasarkan tabel di atas responden mengatakan bahwa pendidikan formal yang dimiliki kurang mendukung LPMD sebanyak 68,4 % . Adapun yang mendukung sebanyak 17,5 % dan sangat mendukung sebanyak 14,0 %.

Tabel 30
Tingkat dukungan pendidikan informal

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak mendukung	-	
2.	Kurang mendukung	44	77,2
3.	Mendukung	9	15,8
4.	Sangat mendukung	4	7,0
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 32

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pendapat responden mengenai dukungan pendidikan informal yang dimiliki oleh pengurus LPMD terhadap tugas dan fungsinya 77,2 % menyatakan kurang mendukung, 15,8 % mendukung dan 7,0 % sangat mendukung, artinya pengurus LPMD kurang memiliki pendidikan informal sehingga dukungannya terhadap kegiatan LPMD sangat rendah. Pendidikan informal yang dimiliki oleh pengurus LPMD adalah pelatihan Perencanaan Partisipatif

Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) yang telah diikuti oleh pengurus LKMD dulu yang kemudian mereka dipilih lagi menjadi pengurus LPMD.

Tabel 31
Tingkat kemampuan menyusun program

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	-	-
2.	Rendah	36	63,2
3.	Tinggi	21	36,8
4.	Sangat tinggi	-	-
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 34

Tingkat pendidikan formal dan informal kurang memadai menyebabkan juga kemampuan mereka dalam menyusun rencana program masih rendah. Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden terhadap kemampuan dalam menyusun rencana program sebanyak 63,2 % responden menyatakan rendah dan 36,8 % menyatakan tinggi. Artinya mereka belum mampu untuk menyusun rencana program mulai dari menemukannya permasalahan, menentukan alternatif pemecahannya dan menentukan pemecahan masalah.

Tabel 32
Tingkat kemampuan merealisasikan program

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	-	-
2.	Rendah	34	59,6
3.	Tinggi	23	40,4
4.	Sangat tinggi	-	-
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 35

Berdasarkan tabel tersebut besarnya dana yang dimiliki oleh LPMMD sangat tergolong rendah. Hampir sebagian besar LPMMD hanya menganggarkan dana dari dana alokasi desa yang besarnya antara Rp 900.000,- - Rp 1.200.000,-. Belum banyak LPMMD yang mampu menggali sumber dana pembangunan dari yang lain.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Kurang dari 1.000.0000	18	31,6
2.	1.000.000,- - 2.000.000,-	23	40,4
3.	2.000.000,- - 10.000.000,-	10	17,5
4.	Lebih dari 10.000.000,-	6	10,5
Total		57	100 %

Tabel 33
Jumlah Dana yang dimiliki LPMMD

2. Sumber Dana

Namun dari sisi kemampuan untuk merealisasikan rencana kerja yang sudah ada, terdapat perbedaan yang tipis, sebanyak 59,6 % responden menyatakan rendah, artinya mereka belum mampu untuk melaksanakan apa yang telah mereka rencanakan. Sedangkan 40,4 % responden yang lain menyatakan tinggi artinya mereka telah mampu untuk melaksanakan kegiatannya.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak mencukupi	16	28,1
2.	Kurang mencukupi	37	64,9
3.	Mencukupi	4	7,0
4.	Sangat mencukupi	-	-
Total		57	100 %

Tabel 34
Tingkat kecukupan dana

Untuk melaksanakan suatu kegiatan tentunya tidak terlepas dari dukungan dana, sedangkan dana yang dimiliki oleh LPM di Kabupaten Rembang menurut jawaban responden dalam tabel di atas 64,9 % menyatakan kurang mencukupi dan 28,1 % menyatakan tidak mencukupi, artinya dana yang dimiliki oleh LPM yang hanya berasal dari alokasi dana bantuan desa sebesar Rp 900.000,- - Rp 1.200.000,- pertahun tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Sedangkan mereka belum mampu untuk menggali dana dari pihak lain. Jika dibandingkan dengan BPD hal ini menimbulkan kesenjangan karena BPD selain mendapat bantuan dari dana bantuan desa juga mendapat bagian dari lelang bonkho deso.

3. Informasi

Tabel 35

Tingkat kemudahan LPM memperoleh informasi

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat sulit	2	3,5
2.	Sulit	13	22,8
3.	Mudah	24	42,1
4.	Sangat mudah	18	31,6
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 39

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ada juga sumber daya yang berupa informasi yang penting untuk merencanakan dan melaksanakan tugas. Informasi yang ada biasanya diperoleh dari pemerintah kabupaten melalui kepala desa, dari masyarakat. Berdasarkan jawaban responden sebagian besar menyatakan mudah untuk memperoleh informasi yaitu 42,1 % dan 31,6 %, artinya LPMD yang ada telah diberikan informasi yang cukup untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan.

Tabel 36
Tingkat akurasi informasi

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak tepat	5	8,8
2.	Kurang tepat	18	31,6
3.	Tepat	26	45,6
4.	Sangat tepat	8	14,0
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 40

Informasi yang ada dalam pertanyaan sebelumnya, jika ditinjau dari segi akurasinya sebanyak 31,6 % menyatakan kurang tepat dan 8,8 % menyatakan tidak tepat, artinya informasi yang ada seringkali bukan informasi yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi LPMD, terutama informasi dari masyarakat dimana masyarakat tidak mau mengungkapkan permasalahan yang ada sehingga LPMD kesulitan untuk mengidentifikasi masalah, di samping itu karena keterbatasan kemampuan kepala desa dalam memperoleh dan menyampaikan informasi yang kadang-kadang terjadi perbedaan. Sedangkan responden lain banyak juga yang menyatakan cukup akurat.

4. Kondisi Fisik

Tabel 37

Kelengkapan kantor yang dimiliki

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak memadai	10	17,5
2.	Kurang memadai	38	66,7
3.	Memadai	9	15,8
4.	Sangat memadai	-	-
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 43

Sebagian besar LPMD memang belum memiliki kantor tersendiri, namun semua LPMD telah memiliki perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor yang ada dijadikan satu dengan perlengkapan kantor yang dimiliki oleh pemerintah desa dan lembaga lain. Kelengkapan kantor yang dimiliki oleh LPMD berdasarkan jawaban responden sebagian besar menyatakan kurang memadai yaitu 66,7 % dan bahkan 17,5 menyatakan sangat tidak memadai. Kelengkapan kantor yang dimiliki hanya berupa meja dan kursi dan ada juga yang stempel saja belum memiliki.

Tabel 38

Kualitas perlengkapan kantor

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat buruk	9	15,8
2.	Buruk	17	29,8
3.	Baik	31	54,4
4.	Sangat baik	-	-
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 44

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	12	21,1
2.	Rendah	20	35,1
3.	Tinggi	25	43,9
4.	Sangat tinggi	-	-
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 45

Tingkat kewenangan yang diberikan oleh Pemda
Tabel 39

1. Kewenangan yang diberikan oleh pemda

jawaban responden didapatkan hasil sebagai berikut :

lain sebagai penyedia sumber daya, dalam hal ini merupakan tingkat kewenangan yang diberikan oleh pemda, tingkat kerjasama LPMD dengan pemerintah desa, dengan lembaga lain yang ada di desa dan dengan tokoh masyarakat. Berdasarkan Variabel kaitan yang memungkinkan merupakan kaitan LPMD dengan lembaga

B.3. Variabel Kaitan yang memungkinkan (X3)

LKMD.

Kualitas perlengkapan kantor yang dimiliki oleh LPMD sebanyak 15,8 % responden menyatakan sangat buruk 29 % menyatakan buruk dan 54,4 % menyatakan baik. Perlengkapan kantor yang baik tersebut merupakan hasil pembelian dari dana alokasi desa yang dimiliki oleh LPMD dan bantuan dari pemerintah desa. Sedangkan yang menyatakan buruk karena perlengkapan kantor yang dimiliki merupakan warisan dari

Tingkat kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah/kabupaten sesuai dengan peraturan daerah menurut para responden sebanyak 43,9% menyatakan kewenangan yang diberikan tinggi karena merupakan sebagian dari fungsi pemerintah yaitu dalam pembangunan. Dalam pembangunan LPMD diberikan wewenang untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang ada di desanya. Namun sebagian yang lain yaitu 35,1% menyatakan masih rendah, karena wewenang yang diberikan tidak diikuti dengan pemberian bantuan yang memadai. Mereka membandingkan dengan wewenang LKMD yang dulu lebih besar karena dipercaya untuk mengelola dana bantuan desa.

Tabel 40

Tingkat keberhasilan usulan LPMD yang disetujui oleh penda

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	17	29,8
2.	Rendah	23	40,4
3.	Tinggi	17	29,8
4.	Sangat tinggi	-	-
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 46

Berdasarkan jawaban para responden dalam tabel tersebut di atas, sebanyak 29,8% menyatakan sangat rendah dan 40,4% rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten kurang responsif terhadap usulan dari desa artinya konsep *bottom up* yang sedang dikembangkan tidak bisa berjalan dengan baik. Usulan-usulan yang disampaikan desa tidak banyak yang disetujui, hanya 29,8% mengatakan tinggi karena kebutuhan usulannya sesuai dengan program kerja yang dimiliki oleh dinas/instansi di tingkat kabupaten.

Berdasarkan tabel tersebut di atas nampak bahwa kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada LPMD untuk melaksanakan pembangunan yang ada di desa termasuk rendah. Sebanyak 26,3 % responden menyatakan sangat rendah dan 45,6 % responden menyatakan rendah. Hal ini menunjukkan penda belum mengakui sepenuhnya LPMD sebagai lembaga pelaksana pembangunan yang ada di desa. Banyak kegiatan pemerintah yang ada di desa tidak melibatkan LPMD, misalnya Program Pengembangan Kecamatan membentuk lembaga sendiri, kegiatan dinas pertanian juga membentuk kelompok pelaksana tersendiri untuk melaksanakan kegiatan di desa dan sebagainya. Demikian juga dalam pengelolaan Dana Bantuan Desa yang sekarang ini dikelola oleh pemerintah desa dengan membentuk PjOK dan PjAK yang terlepas dari LPMD. Hal ini berbeda dengan saat LKMD masih eksis.

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 47

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	15	26,3
2.	Rendah	26	45,6
3.	Tinggi	16	28,1
4.	Sangat tinggi	-	-
Total		57	100 %

Tingkat kewenangan yang diberikan dalam melaksanakan pembangunan di desa
Tabel 41

2. Kerja sama LPMMD dengan Pemerintah Desa

Tabel 42

Tingkat hubungan LPMMD dengan pemerintah desa

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak harmonis	-	-
2.	Kurang harmonis	8	14,0
3.	Harmonis	31	54,4
4.	Sangat harmonis	18	31,6
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 48

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, hubungan LPMMD dengan pemerintah desa terlihat harmonis. Sebanyak 31,6 % menyatakan sangat harmonis dan 54,4 % menyatakan harmonis. Hanya 14,0 % menyatakan kurang harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa LPMMD sebagai mitra pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan telah mendapatkan tanggapan yang positif dari pemerintah desa. Setelah kami lakukan wawancara dengan beberapa kepala desa, ternyata dalam pemilihan pengurus LPMMD tidak melibatkan banyak orang namun banyak yang merupakan penunjukkan oleh kepala desa sehingga diperoleh pengurus yang betul-betul mendukungnya. Responden yang kurang harmonis disebabkan karena LPMMD ingin mengetahui dan terlibat dalam penggunaan dana alokasi desa.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak pernah	-	-
2.	Kadang-kadang	18	31,6
3.	Sering	22	38,6
4.	Sangat sering	17	29,8
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 49

Berdasarkan tabel tersebut di atas, frekuensi rapat antara LPMMD dengan pemerintah desa cukup sering. Sebanyak 38,6 % menyatakan sering dan 29,8 % menyatakan sangat sering. Hal ini menunjukkan bahwa LPMMD sering dilibatkan dalam rapat dengan pemerintah desa terutama dalam membahas usulan kegiatan atau rencana kegiatan pemerintah yang ada di desa. Namun perhatian ini tidak kepada semua pengurus LPMMD, biasanya hanya ketua LPMMD saja yang diajak untuk rapat.

Tabel 43
Frekuensi rapat antara LPMMD dengan Pemerintah Desa

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	-	-
2.	Rendah	12	21,1
3.	Tinggi	34	59,6
4.	Sangat tinggi	11	19,3
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 50

Tabel 44
Dukungan pemerintah desa terhadap kegiatan LPMMD

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, hubungan LPMd dengan BPD terlihat kurang harmonis. Sebanyak 50,9 % responden menyatakan demikian. Hal ini disebabkan antara LPMd dan BPD merasa bahwa dirinya merupakan lembaga yang mewakili masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa BPD belum mengetahui tugas dan fungsi LPMd sehingga terjadi persaingan dalam merebut simpati masyarakat. Namun yang mempunyai hubungan yang harmonis juga tidak sedikit 36,8 % menyatakan hubungannya harmonis dan bahkan 12,3 % sangat harmonis. Hal ini

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 51

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak harmonis	-	-
2.	Kurang harmonis	29	50,9
3.	Harmonis	21	36,8
4.	Sangat harmonis	7	12,3
Total		57	100 %

Tingkat hubungan LPMd dengan BPD
Tabel 45

3. Kerjasama LPMd dengan lembaga lain di desa

Sebagai mitra kerja, pemerintah desa telah memberikan dukungan yang tinggi terhadap kegiatan yang dimiliki LPMd. Sebanyak 59,6 % responden menyatakan tinggi dan 19,3 % menyatakan sangat tinggi. Hanya 21,1 % menyatakan rendah. Yang menyatakan rendah menunjukkan bahwa pemerintah desa merasa apatis terhadap kegiatan LPMd, mereka menganggap LPMd hanyalah sebagai lembaga pelengkap yang hanya sebagai syarat untuk pencairan dana bantuan desa.

menunjukkan bahwa bagi BPD yang telah mengetahui dengan benar tugas dan fungsi

LPM tidak merasa tersaingi karena memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.

Tabel 46

Tingkat dukungan BPD terhadap kegiatan LPM

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak mendukung	3	5,3
2.	Kurang mendukung	21	36,8
3.	Mendukung	32	56,1
4.	Sangat mendukung	1	1,8
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 52

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa 56,1 % menyatakan BPD cukup mendukung kegiatan LPM. Jadi walaupun hubungan ada yang kurang harmonis namun jika LPM mempunyai kegiatan yang baik terhadap masyarakat BPD akan mendukungnya juga. Namun ada juga yang kurang mendukung kegiatan LPM karena adanya persaingan dan kurang mengertinya tugas dan fungsinya masing-masing.

Tabel 47

Tingkat hubungan LPM dengan PKK

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak harmonis	-	-
2.	Kurang harmonis	17	29,8
3.	Harmonis	36	63,2
4.	Sangat harmonis	4	7,0
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 53

Dukungan PKK terhadap kegiatan LPMMD berdasarkan jawaban responden seperti tabel di atas, 64,9 % mendukung kegiatan LPMMD baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini erat kaitannya dengan semangat kedua organisasi yang ingin memberikan yang terbaik buat desanya di samping pengalaman dalam LKMMD yang dulu PKK masuk dalam kepengurusan LKMMD jadi kerjasama yang telah ada antara PKK dengan LPMMD dapat berlanjut kembali.

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 54

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak mendukung	-	-
2.	Kurang mendukung	17	29,8
3.	Mendukung	37	64,9
4.	Sangat mendukung	3	5,3
Total		57	100 %

Tabel 48
Tingkat dukungan PKK terhadap kegiatan LPMMD

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa hubungan PKK dengan LPMMD cukup harmonis. Sebanyak 63,2 % menyatakan harmonis dan 7,0 % menyatakan sangat harmonis. Desa yang menyatakan sangat harmonis karena di LPMMD desa tersebut terdapat seksi pemberdayaan perempuan sehingga LPMMD mampu memperjuangkan aspirasi wanita. Sedangkan yang menyatakan harmonis disebabkan karena mereka mengetahui dengan jelas tugas dan fungsinya.

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 56

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak harmonis	-	-
2.	Kurang harmonis	14	24,6
3.	Harmonis	38	66,7
4.	Sangat harmonis	5	8,8
Total			100 %

Tabel 50
Hubungan LPMd dengan lembaga lain

Berdasarkan tabel di atas, dukungan lembaga RT dan RW terhadap kegiatan LPMd cukup mendukung, 63,2 % responden mengatakan bahwa RT/RW yang ada mendukung dan selalu bekerjasama dengan LPMd dalam kegiatan yang diselenggarakan LPMd. Pertemuan yang diselenggarakan LPMd untuk menjangkau aspirasi warga dan melaksanakan kegiatan yang ada di desa selalu diikuti oleh pengurus RT/RW yang ada. Hal ini dapat diartikan bahwa kerjasama antara LPMd dengan RT/RW sudah berjalan dengan baik.

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 55

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak mendukung	-	-
2.	Kurang mendukung	10	17,5
3.	Mendukung	36	63,2
4.	Sangat mendukung	11	19,3
Total		57	100 %

Tabel 49
Tingkat dukungan RT dan RW terhadap kegiatan LPMd

Kehadiran LPM di desa mendapat sambutan yang baik oleh lembaga-lembaga yang ada di desa seperti karang taruna, lembaga keagamaan, kelompok tani dan sebagainya, sejak LKMD tidak berjalan LPM dianggap sebagai penerus LKMD yang dulu. Menurut jawaban responden 66,7% menyatakan hubungan antara LPM dengan lembaga lain dapat berjalan harmonis.

Tabel 51

Dukungan lembaga lain terhadap kegiatan LPM

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak mendukung	-	-
2.	Kurang mendukung	12	21,1
3.	Mendukung	33	66,7
4.	Sangat mendukung	12	21,1
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 57

Berdasarkan tabel di atas, 66,7% responden menyatakan mendukung kegiatan LPM, artinya lembaga-lembaga lain disamping BPD dan PKK seperti karang taruna, lembaga keagamaan dan sebagainya telah mendukung kegiatan yang dimiliki oleh LPM demi kemajuan desa.

Tabel 52

Dukungan masyarakat (partisipasi) dalam proses perencanaan pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak mendukung	-	-
2.	Kurang mendukung	8	14,0
3.	Mendukung	37	64,9
4.	Sangat mendukung	12	21,1
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 58

Dalam proses perencanaan kegiatan masyarakat sebenarnya sangat mendukung. Berdasarkan jawaban para responden, sebanyak 64,9 % menyatakan masyarakat telah mendukung kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh LPMMD artinya masyarakat mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut melalui ikut dalam rapat, memberikan informasi dan sebagainya.

Tabel 53
Dukungan masyarakat (partisipasi) dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak mendukung	-	-
2.	Kurang mendukung	11	19,3
3.	Mendukung	31	54,4
4.	Sangat mendukung	15	26,3
Total		57	100 %

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 59

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa dukungan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dimiliki oleh LPMMD sangat tinggi. Masyarakat menilai asalkan LPMMD memiliki kegiatan yang baik bagi masyarakat, masyarakat akan mendukungnya. Seperti terlihat dari jawaban responden 54,4 % menyatakan mendukung dan 26,3 % sangat mendukung. Namun ada 19,3 % yang kurang mendukung, hal ini disebabkan karena semangat swadaya gotong royong masyarakat yang mulai menurun dan lokasi kegiatan yang tidak tepat sasaran sehingga masyarakat kurang mendukung.

Apabila kita lihat dari tabel tersebut di atas terhadap pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang ternyata 35,1 % menyatakan rendah dan 17,5 % menyatakan sangat rendah. Artinya bahwa Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa belum mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, rendah dalam menyerap aspirasi/menemukan permasalahan yang ada dalam masyarakat, keberadaannya belum banyak diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga dukungan yang diberikan rendah. Bahkan dukungan dari pemerintah kabupaten diterima oleh LPMMD juga belum cukup karena dari pihak pemerintah kabupaten

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 1 – 18

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	10	17,5
2.	Rendah	20	35,1
3.	Tinggi	22	38,6
4.	Sangat tinggi	5	8,8
Total		57	100

Tabel 54
Variabel pelembagaan

1. Variabel pelembagaan

Analisis hasil penelitian ini merupakan kesimpulan dari masing-masing variabel yaitu variabel pelembagaan, struktur intern, sumber daya dan kaitan yang memungkinkan yang masing-masing diambil dari tabel tunggal tersebut di atas.

C. Analisis Hasil Penelitian

sendiri melalui perda tidak secara tegas menyatakan desa wajib untuk membentuk LPMD, di samping itu dukungan dana dan kebijakan yang memihak kepada LPMD belum cukup sehingga LPMD yang ada menjadi kurang berdaya. Namun ada juga LPMD yang telah cukup tinggi dalam proses pembelajarannya dikarenakan LPMD sebenarnya merupakan organisasi lama (LKMD) yang disusun kembali. Sehingga LPMD yang pengurusnya merupakan pengurus LKMD lama akan lebih mampu menjadikan organisasinya diterima oleh lingkungannya.

Sehingga dari variabel pembelajaran LPMD dapat disimpulkan bahwa LPMD yang ada di Kabupaten Kebang secara umum belum dapat melembaga dengan indikator indikator sebagai berikut :

- Masih banyak LPMD yang belum memiliki rencana kerja yang dibuat secara mandiri
- Masih banyak LPMD yang belum mampu merealisasikan rencana kegiatan karena keterbatasan kemampuannya.
- Keberadaan LPMD belum diakui oleh masyarakat banyak sehingga dukungan terhadapnya masih rendah.
- Rendahnya dukungan dari pemerintah kabupaten termasuk dana dan program pemberdayaan lainnya.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	17	29,8
2.	Rendah	17	29,8
3.	Tinggi	21	36,8
4.	Sangat tinggi	1	1,8
Total		57	100

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 30 - 44

Tabel 56
Variabel Sumber Daya

3. Variabel Sumber Daya

Sebuah organisasi yang melembaga harusnya dapat mencapai kompetensi teknis dalam semua komponennya dan kepaduan yang efektif di antara komponen-komponen tersebut. Berdasarkan tabel tersebut di atas untuk variabel struktur intern, LPM di Kabupaten Rembang belum dapat memenuhi kriteria-kriteria struktur intern yang bagus. Terbukti 52,6 % responden menjawab rendah dan 21,1 % menjawab sangat rendah, hal ini mengindikasikan bahwa struktur intern dalam organisasi Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa belum dapat berjalan dengan baik.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	12	21,1
2.	Rendah	30	52,6
3.	Tinggi	13	22,81
4.	Sangat tinggi	2	3,5
Total		57	100

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 19 - 29.

Tabel 55
Variabel Struktur Intern

2. Variabel Struktur Intern

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas membuktikan bahwa sumber daya yang ada pada LPM di Kabupaten Rembang masih rendah, yaitu 29,8% menyatakan sangat rendah demikian juga yang menyatakan rendah sebanyak 29,8% dibandingkan yang tinggi dan sangat tinggi 35,1% dan 12,3%. Dalam variabel sumber daya yang dimiliki LPM adalah sumber daya manusia dan sumber dana, sedangkan sumber daya informasi cukup tinggi dengan bukti bahwa LPM mudah mendapat informasi dan tingkat akurasi cukup tinggi. Untuk kondisi kantor, sebagian besar LPM memang belum memiliki kantor tersendiri namun telah memiliki peralatan kantor yang disatukan dengan peralatan kantor milik pemerintah desa. Namun untuk sumber daya yang paling berpengaruh sebenarnya adalah sumber daya manusia dan sumber dana.

4. Variabel Kaitan yang memungkinkan

Tabel 57

Variabel Kaitan yang memungkinkan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat rendah	7	12,3
2.	Rendah	16	28,1
3.	Tinggi	28	49,1
4.	Sangat tinggi	6	10,5
Total		57	100

Sumber : Jawaban pertanyaan kuesioner no. 45 - 59

Variabel kaitan yang memungkinkan (*enabling linkages*) dapat digolongkan tinggi, sebanyak 49,1% menjawab tinggi dan 10,5% menjawab sangat tinggi, artinya

LPMD yang ada di Kabupaten Rembang mempunyai kaitan yang baik dengan pemerintah desa, BPD, PKK, lembaga lain dan masyarakat. Sebanyak 28,1 % dan 12,3 % menjawab rendah dan sangat rendah, artinya kaitan dengan lembaga-lembaga yang ada belum berjalan dengan baik.

5. Korelasi antara Struktur Intern dengan Pelembagaan LPMD

Tabel 58
Hubungan antara variabel struktur intern dengan pelembagaan

PELEMBAG * STRUKTUR Crosstabulation

Total		STRUKTUR INTERN				Total	
		Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi	Count	% within
Sangat rendah	Count	7	3			10	17.5%
	% within STRUKTUR	58.3%	10.0%				
Rendah	Count	5	13	2		20	35.1%
	% within STRUKTUR	41.7%	43.3%	15.4%			
Tinggi	Count		12	9	1	22	38.6%
	% within STRUKTUR		40.0%	69.2%	50.0%		
Sangat tinggi	Count		2	2	1	5	8.8%
	% within STRUKTUR		6.7%	15.4%	50.0%		
Total		Count	12	30	13	2	57
		% within STRUKTUR	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Tabel silang tersebut di atas untuk mendapatkan gambaran secara deskriptif kualitatif mengenai hubungan antara setiap variabel struktur intern dengan variabel pelembagaan dapat kita lihat persebaran atau konsentrasi nilai persentase pada titik diagonal untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan. Berdasarkan tabel tersebut di atas persebaran nilai persentase pada setiap sel menunjukkan adanya konsentrasi

pada titik diagonal sangat rendah-sangat rendah (58,3 persen), rendah-rendah (43,3 persen), tinggi-tinggi (69,2 persen) dan sangat tinggi-sangat tinggi (50,0 persen). Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara struktur intern dengan tingkat pelebaganan LPMD di Kabupaten Rembang atau struktur intern mempengaruhi tingkat pelebaganan.

6. Korelasi antara Sumber Daya dengan Pelebaganan LPMD

Tabel 59
Hubungan antara variabel sumber daya dengan pelebaganan

PELEMBAG * SUMBERDA Crosstabulation

		Sangat rendah		Rendah		Tinggi		Sangat tinggi		Total	
SOURCESUMBER DA	Count	% within SOURCESUMBER DA		% within SOURCESUMBER DA		% within SOURCESUMBER DA		% within SOURCESUMBER DA		Count	% within SOURCESUMBER DA
		Count	%	Count	%	Count	%	Count	%		
Sangat rendah	8	47.1%	11.8%	10	58.8%	47.1%	47.1%	1	5.9%	17	100.0%
Rendah	8	47.1%	9.5%	2	9.5%	58.8%	29.4%	5	29.4%	17	100.0%
Tinggi	22	47.1%	16.3%	16	76.2%	5.9%	29.4%	1	5.9%	17	100.0%
Sangat tinggi	5	47.1%	14.3%	3	14.3%	5.9%	29.4%	3	14.3%	21	100.0%
Total	10	47.1%	17.5%	20	35.1%	22	38.6%	5	8.8%	57	100.0%

Demikian juga dengan korelasi antara variabel sumber daya dengan tingkat pelebaganan, berdasarkan tabel tersebut di atas persebaran nilai persentase pada setiap sel menunjukkan adanya konsentrasi pada titik diagonal sangat rendah-sangat

rendah (47,1 persen), rendah-rendah (58,8 persen), tinggi-tinggi (76,3 persen) dan sangat tinggi-sangat tinggi (100,0 persen). Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara sumber daya dengan tingkat pelembagaan LPMD di Kabupaten Rembang

7. Korelasi antara kaitan yang memungkinkan dengan pelembagaan LPMD

Tabel 60

Hubungan antara variabel kaitan yang memungkinkan dengan pelembagaan

PELEMBAG * KAITAN Y Crosstabulation

		KAITAN YANG MEMUNGKINKAN						
		Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi	Total		
Sangat rendah	Count	4	3	2	1	10	% within KAITAN Y	57.1%
	% within PELEMBAGAN	28.6%	50.0%	32.1%	16.7%	35.1%	Count	2
Rendah	Count	2	8	9	1	20	% within KAITAN Y	28.6%
	% within PELEMBAGAN	14.3%	31.3%	50.0%	33.3%	38.6%	Count	2
Tinggi	Count	1	5	14	2	22	% within KAITAN Y	14.3%
	% within PELEMBAGAN	6.1%	16.7%	21.1%	10.0%	24.4%	Count	3
Sangat tinggi	Count	0	0	0	5	5	% within KAITAN Y	0.0%
	% within PELEMBAGAN	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	5.6%	Count	6
Total		7	16	28	6	57	% within KAITAN Y	100.0%

Masih seperti penjelasan terdahulu, untuk variabel kaitan yang memungkinkan (enabling linkages) dengan tingkat pelembagaan, berdasarkan tabel tersebut di atas persebaran nilai persentase pada setiap sel menunjukkan adanya konsentrasi pada titik diagonal sangat rendah-sangat rendah (57,1 persen), rendah-rendah (50,0 persen), tinggi-tinggi (50,0 persen) dan sangat tinggi (33,3 persen). Hal

Berdasarkan tabel tersebut di atas hubungan antara variabel struktur intern (X1) dengan variabel tingkat pembelajaran (Y) menggunakan rumus statistik Rank Kendall menghasilkan nilai koefisien korelasi tau (τ) sebesar 0,588 dengan taraf signifikansi 0,05 mempunyai nilai Approx. Sig sebesar 0,000. dan nilai z hitung 6,986 yang lebih besar dari z tabel yaitu 1,96. Jadi dapat diputuskan dalam penelitian ini dapat menerima hipotesis kerja (Ha) bahwa ada pengaruh antara struktur intern dengan tingkat pembelajaran LPMD di Kabupaten Rembang dan menolak Hipotesis Nol (H_0).

Kemudian hubungan antara variabel sumber daya (X2) dengan variabel tingkat pembelajaran (Y) menggunakan rumus statistik Rank Kendall menghasilkan nilai koefisien korelasi tau (τ) sebesar 0,588 dengan taraf signifikansi 0,05 mempunyai nilai Approx. Sig sebesar 0,000. dan nilai z hitung 6,986 yang lebih besar dari z tabel yaitu 1,96. Jadi dapat diputuskan dalam penelitian ini dapat menerima hipotesis kerja (Ha) bahwa ada pengaruh antara struktur intern dengan tingkat pembelajaran LPMD di Kabupaten Rembang dan menolak Hipotesis Nol (H_0).

N	57
Kendall's W	.876
Chi-Square	149.833
df	3
Asymp. Sig.	.000

Mean Rank	Y	2.39
	X ₁	2.53
	X ₂	1.08
	X ₃	4.00

Dan terakhir hubungan semua variabel bebas yaitu hubungan antara variabel struktur intern (X1), sumber daya (X2) dan kaitan yang memungkinkannya (X3) dengan variabel tingkat pembelajaran (Y) menggunakan rumus statistik Konkordansi Kendall menghasilkan nilai W sebesar 0,876 dan nilai Chi Square X^2 sebesar 149,833 pada $d.f = 3$, dinyatakan bahwa nilai Chi square tersebut dengan taraf signifikansi 0,05 mempunyai nilai Asymp. Sig sebesar 0,000. Nilai X^2 tersebut di atas lebih besar dari nilai X^2 tabel yaitu 7,815. Jadi dapat diputuskan dalam penelitian ini dapat menerima hipotesis kerja (Ha) bahwa ada pengaruh antara struktur intern, sumber

menolak Hipotesis Nol (H_0).

menungkinkan dengan tingkat pembelajaran LPM di Kabupaten Rembang dan menerima hipotesis kerja (Ha) bahwa ada pengaruh antara kaitan yang lebih besar dari z tabel yaitu 1,96. Jadi dapat diputuskan dalam penelitian ini dapat 0,05 mempunyai nilai Approx. Sig sebesar 0,001, dan nilai z hitung 3,331 yang menghasilkan nilai koefisien korelasi tau (τ) sebesar 0,384 dengan taraf signifikansi variabel tingkat pembelajaran (Y) menggunakan rumus statistik Rank Kendall Sedangkan untuk hubungan antara variabel kaitan yang memungkinkannya (X3) dengan Kabupaten Rembang dan menolak Hipotesis Nol (H_0).

(Ha) bahwa ada pengaruh antara sumber daya dengan tingkat pembelajaran LPM di yaitu 1,96. Jadi dapat diputuskan dalam penelitian ini dapat menerima hipotesis kerja Approx. Sig sebesar 0,000. dan nilai z hitung 10,820 yang lebih besar dari z tabel koefisien korelasi tau (τ) sebesar 0,711 dengan taraf signifikansi 0,05 mempunyai nilai

daya, dan kaitan yang memungkinkannya dengan tingkat pelaksanaan LPM di

Kabupaten Rembang dan menolak Hipotesis Nol (H_0).

Sedangkan nilai koefisien determinasi yang merupakan kuadrat dari nilai koefisien korelasi Kendall yaitu $0,876^2$ atau sama dengan $r = 0,767$. Berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa secara bersama-sama ketiga variabel bebas tersebut memberikan pengaruh sebesar $76,7\%$ terhadap tingkat pelaksanaan LPM di Kabupaten Rembang dan $23,3\%$ disebabkan oleh faktor-faktor lain.

D. Diskusi

Menurut Milton J Esman dalam teori pembangunan lembaga yang telah disampaikan dalam BAB II Tinjauan Pustaka, dimana dinyatakan bahwa pembangunan lembaga dirumuskan sebagai perencanaan, penataan dan bimbingan bagi organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali yang :

- a. mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik dan atau sosial,
- b. menetapkan, mengembangkan dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru, dan
- c. memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut.

Atau dengan kata lain pembangunan berarti bahwa organisasi dan inovasi-inovasi yang dibawa oleh organisasi itu telah diterima dan didukung oleh lingkungan eksternal (masyarakat), peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang tidak dapat berjalan dengan baik, artinya

LPMD yang telah terbentuk belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. LPMD yang dibentuk belum merupakan keinginan seluruh warga masyarakat, namun sebagian hanya menyatakan untuk menjaga kesinambungan agar LKMD yang dulu tidak mati dan bahkan ada pula yang menyatakan hanya ingin membentuk sebagai syarat dicairkannya seluruh bantuan dana alokasi desa.

Pembentukan LPMD yang ada di Kabupaten Rembang belum merupakan prakarsa masyarakat namun lebih kepada pola top down dari pemerintah untuk membentuk lembaga tersebut sebagai prasyarat dicairkannya bantuan kepada desa. Sehingga sampai saat ini sudah semua desa/keurahan telah membentuk LPMD, karena merupakan keharusan. Padahal menurut wawancara kami dengan Kepala Desa Ngotet Kecamatan Rembang yang pada awalnya tidak ingin membentuk LPMD di desanya menginginkan untuk lembaga pelaksana pembangunan pemerintah desa membentuk panitia tersendiri, misal panitia pembangunan masjid, panitia pembangunan jalan dan sebagainya, sehingga pemerintah kabupaten tinggal mengesahkannya sebagai lembaga pelaksana sehingga polanya merupakan bottom up. Sedangkan untuk perencanaan desa akan mengaktifkan kepala seksi pembangunan dan kepala seksi yang lain yang ada di pemerintah desa untuk dapat lebih menemukani dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Di samping itu peraturan daerah yang tidak tegas mengatur tentang pembentukan LPMD dimana disebutkan bahwa desa dapat membentuk LPMD, kata “dapat” menimbulkan dua penafsiran bahwa boleh membentuk tidak. Akibatnya lembaga yang sudah terbentuk kurang mendapat dukungan dari lingkungannya termasuk dukungan dana, maupun sumber daya lainnya.

Beberapa hal tersebut di atas merupakan sebagian penyebab kurang berhasilnya proses pembelajaran Lembaga Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang sehingga LPMID kurang dapat berfungsi.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikembangkan pada tinjauan pustaka disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran adalah kepemimpinan, doktrin, program, sumber daya, struktur intern, kaitan-kaitan yang memungkinkan, yang normatif dan yang tersebar serta faktor-faktor lain. Kemudian jika kita kaitkan dengan penelitian ini dimana proses pembelajaran di Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang dipengaruhi oleh variabel struktur intern, sumber daya dan kaitan yang memungkinkan, maka berdasarkan analisis data dapat kita artikan sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil tabulasi silang (*cross tab*) antara variabel terikat dengan variabel bebas yaitu variabel pembelajaran dengan variabel struktur intern, sumber daya dan kaitan yang memungkinkan menunjukkan bahwa persebaran nilai persentase pada setiap sel menunjukkan adanya konsentrasi pada titik diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel bebas mempengaruhi secara positif variabel terikat, artinya semakin tinggi variabel bebas maka semakin tinggi variabel terikat. Dengan kata lain peningkatan struktur intern akan meningkatkan tingkat pembelajaran, peningkatan sumber daya akan meningkatkan pembelajaran dan peningkatan kaitan yang memungkinkan akan juga tingkat pembelajaran atau semakin buruk/rendah variabel struktur intern, sumber daya dan kaitan yang memungkinkan akan semakin rendah pula tingkat pembelajaran.

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan rumus statistik Rank Kendall untuk mengetahui tingkat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, didapatkan hasil sebagai berikut, pertama, korelasi antara struktur intern (X1) dengan tingkat pembelajaran (Y) menghasilkan nilai koefisien korelasi tau (τ) sebesar 0,588 dengan taraf signifikansi 0,05, mempunyai harga z yang lebih besar dari z tabel, yang artinya menerima hipotesis kerja (Ha) bahwa ada pengaruh antara struktur intern dengan tingkat pembelajaran LPMD di Kabupaten Rembang dan menolak Hipotesis Nol (Ho), kedua korelasi antara variabel sumber daya (X2) dengan variabel tingkat pembelajaran (Y) menghasilkan nilai koefisien korelasi tau (τ) sebesar 0,711 dengan taraf signifikansi 0,05, mempunyai harga z yang lebih besar dari z tabel, artinya dapat menerima hipotesis kerja (Ha) bahwa ada pengaruh antara sumber daya dengan tingkat pembelajaran LPMD di Kabupaten Rembang dan menolak Hipotesis Nol (Ho), dan ketiga korelasi antara variabel kaitan yang memungkinkan (X3) dengan variabel tingkat pembelajaran (Y) menggunakan rumus statistik Rank Kendall menghasilkan nilai koefisien korelasi tau (τ) sebesar 0,384 dengan taraf signifikansi 0,05, mempunyai harga z yang lebih besar dari z tabel, artinya menerima hipotesis kerja (Ha) bahwa ada pengaruh antara kaitan yang memungkinkan dengan tingkat pembelajaran LPMD di Kabupaten Rembang dan menolak Hipotesis Nol (Ho).

- Berdasarkan analisis statistik dengan menggunakan rumus konkordansi Kendall untuk mengetahui korelasi seluruh variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel terikat di dapatkan hasil hubungan antara variabel struktur intern (X1), sumber daya (X2) dan kaitan yang memungkinkan (X3) dengan variabel tingkat pembelajaran (Y) menggunakan rumus statistik Konkordansi Kendall menghasilkan nilai W sebesar 0,876 dan nilai Chi Square X^2 sebesar 149,833 pada $df = 3$, dinyatakan bahwa nilai Chi square tersebut memiliki taraf signifikansi 0,05 berada di atas nilai Chi Square X^2 tabel 7,815. Jadi dapat diputuskan dalam penelitian ini dapat menerima hipotesis kerja (Ha) bahwa ada pengaruh antara struktur intern, sumber daya, dan kaitan yang memungkinkan dengan tingkat pembelajaran LPM di Kabupaten Rembang dan menolak Hipotesis Nol (H_0).

- Nilai koefisien determinasi yang merupakan kuadrat dari nilai koefisien konkordansi Kendall yaitu $0,876^2$ atau sama dengan 0,767. Berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa secara bersama-sama ketiga variabel bebas tersebut memberikan pengaruh sebesar 76,7% terhadap tingkat pembelajaran LPM di Kabupaten Rembang dan 23,3% disebabkan oleh faktor-faktor lain.

Oleh karena itu berdasarkan teori yang telah disampaikan dan hasil riset di lapangan yang kemudian diolah menggunakan rumus statistik didapatkan hasil bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pembelajaran LPM di Kabupaten Rembang diantaranya adalah struktur intern, sumber daya dan kaitan yang memungkinkan. Berdasarkan hasil analisis statistik di dapat nilai-nilai korelasi yang

- signifikan, oleh karena itu jika hal ini tidak segera diperbaharui maka akan membawa implikasi terhadap proses pembelajaran LPM, di mana :
- Tujuan pembentukan LPM tidak akan terwujud dengan baik
 - LPM kurang dapat menjalankan tugas dan fungsinya, baik fungsi perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan fungsi yang lain.
 - Pembangunan yang ada di desa menjadi tidak menentu karena kurangnya perencanaan dan pengkoordinasian dalam pelaksanaannya.

Faktor sumber daya yang ada pada Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang dapat dikatakan rendah (45,6 % menyatakan rendah dan 15,8 % menyatakan sangat rendah). Rendahnya faktor sumber daya ini ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan formal dan informal partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan.

Faktor struktur intern yang ada pada Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang dapat dikatakan rendah (52,6 % menyatakan rendah dan 21,1 % menyatakan sangat rendah). Rendahnya faktor struktur intern ini ditandai oleh rendahnya tingkat kejelasan pembagian kerja, beban pekerjaan yang cukup berat, pola hubungan antara pimpinan dan bawahan yang kurang harmonis, kejelasan wewenang yang kurang serta rendahnya tingkat

lingkungan. Faktor struktur intern yang ada pada Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang dapat dikatakan rendah (52,6 % menyatakan rendah dan 21,1 % menyatakan sangat rendah). Rendahnya faktor struktur intern ini ditandai oleh rendahnya kemampuan LPMD dalam berinteraksi dan rendahnya dukungan merencanakan dan melaksanakan kegiatan, rendahnya kemandirian LPMD, pembelajaran ini ditandai dengan rendahnya kemampuan LPMD dalam intern, sumber daya dan kaitan yang memungkinkan. Rendahnya tingkat Rendahnya tingkat pembelajaran ini banyak dipengaruhi oleh faktor struktur kurang dapat berjalan dengan baik (35,1 % rendah dan 17,5 % sangat rendah). Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa proses

A. Kesimpulan

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V

pengurus LPMJ, rendahnya kemampuan pengurus LPMJ serta rendahnya dukungan dana

Faktor kaitan yang memungkinkan yang ada pada Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang dapat dikatakan cukup tinggi (49,1 % menyatakan tinggi dan 10,5 % menyatakan sangat tinggi). Sedangkan yang menyatakan rendah sebesar 28,1 % dan sangat rendah 12,3 %. Rendahnya faktor kaitan yang memungkinkan ini ditandai oleh rendahnya kualitas hubungan antara LPMJ dengan pemerintah daerah serta dengan BPD.

Kemudian menurut hasil pengujian menggunakan rumus statistik Rank Kendall di dapat hasil korelasi antara variabel struktur intern dengan pembelajaran sebesar 0,588, antara sumber daya dengan pembelajaran sebesar 0,711 dan antara kaitan yang memungkinkan sebesar 0,384. Nilai-nilai tersebut mempunyai nilai z yang lebih besar dari z tabel sehingga variabel-variabel bebas tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pembelajaran LPMJ di Kabupaten Rembang. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini, variabel struktur intern mempengaruhi sebesar 58,8 % terhadap tingkat pembelajaran, sumber daya berpengaruh sebesar 71,1 % dan kaitan yang memungkinkan sebesar 38,4 % terhadap tingkat pembelajaran LPMJ di Kabupaten Rembang. Untuk urutan besarnya pengaruh variabel sumber daya memiliki pengaruh yang paling besar kemudian struktur intern dan terakhir kaitan yang memungkinkan.

Selanjutnya menurut hasil pengujian menggunakan rumus statistik konkordansi Kendall untuk mengetahui hubungan ketiga variabel bebas dengan

pelembagaan LPM di Kabupaten Rembang tergolong rendah. Jika hal ini tidak Hasil tersebut di atas nampak bahwa nilai-nilai dimana tingkat

Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang dan kaitan yang memungkinkan terhadap tingkat pelembagaan Lembaga 4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara struktur intern, sumber daya Masyarakat Desa di Kabupaten Rembang

memungkinkan (X3) terhadap tingkat pelembagaan Lembaga Pembangunan 3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kaitan yang Kabupaten Rembang

terhadap tingkat pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di 2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sumber daya (X2) Kabupaten Rembang

terhadap tingkat pelembagaan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa di 1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara struktur intern (X1) ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka dalam penelitian doktrin, tujuan, dan sebagainya.

sebesar 76,7 % sedangkan 23,3 % disebabkan oleh faktor-faktor yang lain seperti variabel tersebut secara bersama-sama mempengaruhi tingkat pelembagaan Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,767 atau 76,7 %, artinya ketiga ini mempunyai Chi square yang lebih tinggi dari tabel ($149,833 > 7,815$). pelembagaan LPM di Kabupaten Rembang di dapat nilai W sebesar 0,876 nilai

segera dipertimbangi maka akan membawa implikasi terhadap proses pembelajaran LPMID, di mana :

- Tujuan pembelajaran LPMID tidak akan terwujud dengan baik
- LPMID kurang dapat menjalankan tugas dan fungsinya, baik fungsi perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan fungsi yang lain.
- Pembangunan yang ada di desa menjadi tidak menentu karena kurangnya perencanaan dan pengkoordinasian dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil uji hipotesis nampak bahwa rendahnya tingkat pembelajaran LPMID disebabkan oleh variabel sumber daya, variabel struktur intern dan kaitan yang memungkinkan. Oleh karena itu beberapa saran atau rekomendasi yang bersifat strategis dapat diajukan kepada berbagai pihak yang memiliki kepedulian dan komitmen serta kompetensi dalam upaya pembangunan desa, bahwasanya dalam pembangunan desa diperlukan suatu organisasi desa yang dapat merencanakan, melaksanakan pembangunan. Organisasi tersebut harus mampu mempromosikan desanya kepada berbagai pihak sehingga pihak-pihak lain mempunyai kepedulian untuk membangun desanya tersebut. Untuk itu organisasi yang ada harus betul-betul melembaga artinya organisasi dan inovasi yang dibawa oleh organisasi tersebut dapat diterima dan didukung oleh lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu berkaitan dengan penelitian ini maka saran yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan sumber daya, maka karena pengaruhnya yang sangat kuat maka perlu peningkatan sumber daya baik sumberdaya manusia maupun sumber dana serta sumber daya yang lain. Peningkatan sumber daya dapat dilakukan dengan pelatihan peningkatan kemampuan misal Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) maupun pelatihan keterampilan teknis lain. Di samping itu alokasi dana bantuan untuk LPMD perlu di tingkatkan dan perlu dicarikan alternatif pendanaan lainnya.
2. Karena pengaruh struktur intern terhadap pelaksanaan maka diperlukan penguatan struktur intern melalui berbagai pelatihan kapasitas lembaga (*capacity building*) kepada pengurus LPMD sehingga terdapat kompetensi teknis dalam semua komponennya dan kepaduan yang efektif di antara komponen-komponen dalam organisasi tersebut.
3. Kemudian dengan kaitan yang memungkinkan, hubungan kerjasama dengan berbagai pihak sudah cukup baik namun dengan pemerintah kabupaten dan BPD kurang baik. Untuk itu kepada pihak kabupaten harus rajin memberikan bantuan pembinaan dan pemberdayaan kepada LPMD melalui berbagai program penguatan kapasitas LPMD. Kepada BPD harus dilakukan sosialisasi secara intensif sehingga masing-masing mengerti akan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga akan saling mendukung kegiatannya masing-masing.

- Argyrous, George, 1996, *Statistics for Social Research*, Macmillan Education Australia PTY LTD, Melbourne
- Badjuri Abdulkahar & Teguh Yuwono, 2003, *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Budi Winarno, 2003, *Komparasi Organisasi Pedesaan dalam Pembangunan*, Media Presindo, Jakarta
- Chambers, Robert, 1987, *Pembangunan Desa mulai dari belakang*, LP3ES, Jakarta
- Dunn, William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Eaton, Joseph W, 1986, *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari konsep ke aplikasi*, UI Press, Jakarta
- Gibson, James L, dkk, 1992, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku - Struktur - Proses)*, Erlangga, Jakarta
- Irfan Isamy, 1994, *Prinsip-prinsip Kebijakan Publik*, Bina Aksara Jakarta.
- Israel, Asturo, 1990, *Pengembangan Kelambagaan*, LP3ES, Jakarta
- Koentjaraningrat, 1981, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Aksara.
- Malayu SP Hasibuan, 1999, *Organisasi dan Motivasi (dasar Peningkatan Produktivitas)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Maskun, Sumitro, 1993, *Pembangunan Masyarakat Desa Asas, Kebijakanaksanaan dan Manajemen*, MV Mandala, Yogyakarta
- Miftah Toha, 1993, *Prinsip-prinsip Administrasi Publik*, Rajawali press, Jakarta
- Miftah Toha, 1993, *Pembinaan organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*, Rajawali press, Jakarta
- Nazir, Mohammad, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Robbins, Stephen P, 2002, *Perilaku Organisasi*, Prenhalindho, Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Rusidi, 1993, *Teladan Usulan Penelitian*, Bandung, UPT IKOPIN.
- Santoso, Singih, 2000, *SPSS (Statistical Packages For The Social Sciences)* Cetakan Kedua, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Siegel, Sidney, 1990, *Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta, Gramedia.
- Simamora, Henry, 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Kedua)*, STIE YKPN Yogyakarta
- Singarimbun, Masi dan Effendi, Sofyan, 1995, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES.
- Soetrisno Hadi, 1980, *Metodologi Research I, YPFP UGM, Yogyakarta.*
- _____, *Metodologi Research II, YPFP UGM, Yogyakarta*, 1980.
- Solichin Abdul Wahab, 1990, *Analisa Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Surakhmad, Winarno., 1994. *Pengantar Metode Penelitian Ilmiah*, Bandung, Transito
- Usman, Sunyoto, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Wibawa S, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta
-
- Tahun 2002*
- _____, 2002, *Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2*